

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TANGERANG

NOMOR HK.02.02.13B.12.25.862 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
TANGERANG TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANGERANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Tangerang tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI TANGERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI TANGERANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Tangerang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Tangerang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai POM di Tangerang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Tangerang untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai POM di Tangerang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Tangerang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Tangerang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. Tangerang
pada tanggal : 5 Desember 2025
Kepala Balai POM di Tangerang



M. SONY MUGHOFIR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Balai POM di Tangerang merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah ditetapkan sebagaimana amanat dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. Sebagai sebuah satuan kerja, Balai POM di Tangerang memiliki kewenangan, tugas dan fungsinya untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Rencana Strategis Balai POM di Tangerang disusun dengan berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan Renstra Badan POM Tahun 2025-2029, serta dan perubahan lingkungan strategis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Balai POM di Tangerang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang cukup pesat serta maraknya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring membuat Balai POM di Tangerang harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan, memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar.

Wilayah kerja Balai POM di Tangerang mencakup Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan serta Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah Industri dan penyangga Ibu Kota, sehingga menjadi salah satu pintu masuk utama Provinsi Banten yang berpotensi menyebabkan masuknya produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan ke wilayah Provinsi Banten.

Selain itu, komitmen pemerintah daerah untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna peningkatan ekonomi di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang juga berpengaruh terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tangerang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang beberapa kebijakan pemerintah daerah yang pada intinya bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan para pelaku usaha, Balai POM di Tangerang juga memiliki kewajiban dan peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan

tersebut untuk memudahkan para pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang, Balai POM di Tangerang senantiasa membantu para pelaku usaha dengan melakukan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha pada saat mengurus perizinan produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Pada tahun 2019-2024 terdapat pelaku usaha termasuk UMKM yang sedang mengurus dan telah mendapatkan izin edar di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang yang meliputi komoditi pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di BPOM juga menjadi tantangan serta peluang tersendiri bagi Balai POM di Tangerang untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar yang merupakan ekspektasi masyarakat.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri sediaan farmasi dan makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun diperlukan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Maka Balai POM di Tangerang berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Makanan dengan melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* terkait. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) tersebut terdiri dari tiga lapis, antara lain sub-sistem pengawasan pelaku usaha (produsen), sub-sistem pengawasan pemerintah/BPOM, dan sub-sistem pengawasan konsu Organisasi dan tata kerja Balai Besar/Balai/Loka ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Balai POM di Tangerang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Unit Pelaksana Teknis BPOM

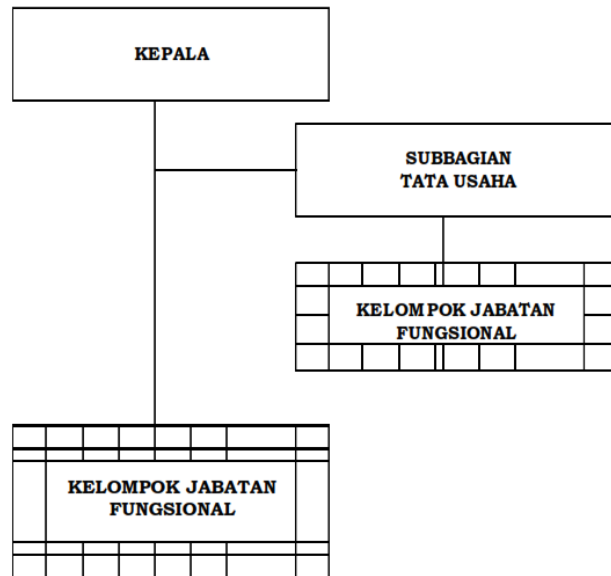
Unit Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis BPOM

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM No. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, maka pelaksanaan tugas pokok pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Balai POM di Tangerang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Tangerang

1.1.1 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI TANGERANG TAHUN 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM, khususnya Balai POM di Tangerang.

Sepanjang tahun 2020 sd. 2024, pengukuran capaian kinerja Balai POM di Tangerang telah dilakukan secara mandiri. Berikut merupakan sandingan realisasi tahun 2020 sd. 2024:

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai POM di Tangerang tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	76,30	94,43	83,60	82,76	99,00	85,00	81,46	95,84	88,00	88,39	100,44	92,00	85,02	92,41
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	68,75	88,14	77,00	60,61	78,71	81,00	74,47	91,94	83,00	92,45	111,39	92,50	88,06	95,20
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	79,41	110,29	80,00	85,45	106,81	82,00	67,86	82,76	84,00	85,45	101,73	86,00	85,57	99,50
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60,00	36,84	61,40	62,00	58,82	94,87	64,00	92,30	144,22	66,00	68,42	103,67	68,50	69,77	101,85
		5 Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat										82,00	80,00	97,56	82,00	100,00	121,95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu													89,50	89,40	99,89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan													88,00	98,46	111,89
		8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan													87,36	86,10	98,56
		9 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik													92,50	95,96	103,74
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	83,33	95,78	88,00	91,49	103,97	89,00	90,52	101,71	91,00	92,83	102,01	93,00	93,16	100,17
		11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,60	57,45	101,50	64,00	59,24	92,56	71,00	64,15	90,35	78,00	83,55	107,12	85,00	85,54	100,64
		12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00	91,07	109,72	88,00	92,11	104,67	91,00	92,65	101,81	94,00	96,59	102,76	97,00	98,18	101,22
		13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42,00	37,74	89,86	50,00	51,85	103,70	55,00	50,77	92,31	60,00	54,41	90,68	65,00	55,88	85,97
		14 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	48,78	88,69	60,00	67,03	111,72	63,00	61,35	97,38	66,00	70,88	107,39	71,00	63,12	88,90

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %
		15 Indeks pelayanan publik													3,55	3,68	103,66
		16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77,00	88,89	115,44	79,00	83,33	105,48	83,50	100,00	119,76
		17 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95,00	100,00	105,26
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	18 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,90	91,91	107,00	91,50	91,55	100,05	92,40	93,87	101,59	93,30	94,36	101,14	95,20	96,51	101,38
		19 Jumlah sekolah dengan pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman													4,00	4,00	100,00
		20 Jumlah desa pangan aman													1,00	1,00	100,00
		21 Jumlah pasar aman berbasis komunitas													1,00	1,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	22 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00
		23 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	24 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55,00	65,00	118,18	65,00	43,00	66,15	68,00	70,00	102,94	72,00	68,13	94,63	69,00	77,50	112,32
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tangerang yang optimal	25 Indeks reformasi birokrasi (RB)													75,00	74,27	99,03
		26 Nilai AKIP Balai POM di Tangerang							80,60	75,02	93,08	82,20	71,79	87,34	79,03	75,34	95,33

A. Capaian Kinerja/Realisasi Indikator Kinerja per Sasaran Kegiatan

A.1. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat”

1. IK ‘Persentase obat yang memenuhi syarat’

Pada tahun 2024 target sampel obat acak Balai POM di Tangerang sebanyak 246 sampel dengan realisasi tahun 2024 sebanyak 247 sampel. Realisasi pada TW III diperoleh sampel obat memenuhi syarat sebanyak 37 sampel dari 247 sampel yang telah diperiksa dan diuji.



Gambar 2. Tren Persentase Obat yang memenuhi syarat

Penyebab kegagalan/penurunan kinerja yaitu Pengaruh hasil evaluasi penandaan/ label yang mempengaruhi hasil kesimpulan akhir, dimana salah satu komoditi yaitu kosmetik menjadi penyumbang besar, dengan kondisi pada tahap pre market tidak terdapat persetujuan label, serta jumlah sampel kosmetik 54% dari total sediaan farmasi.

Program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan / penurunan kinerja seperti kegiatan sosialisasi ataupun bimbingan teknis terkait klaim dan penandaan yang diinisiasi Balai POM Tangerang maupun Badan POM RI tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha, dan tidak diserap dengan baik untuk diimplementasikan.

2. IK ‘Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat’

Target sampel makanan Acak tahun 2024 adalah 67 sampel, pada triwulan IV telah dilakukan sampling makanan acak sebanyak 67 sampel. Pada triwulan IV 2024 diperoleh sampel makanan memenuhi syarat sebanyak 59 sampel dari total 67 sampel yang diperiksa dan diuji, 8 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat disebabkan karena Cemaran Mikrobiologi yang melebihi batas ambang (Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir, Salmonella, dan Angka *Enterobacteriaceae*), kandungan kimia yang

melebihi batas ambang (Penetapan Kadar Hidroksimetilfurfural/HMF), dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan Mayor dimana sesuai pedoman sampling TMK Penandaan Mayor dapat menyebabkan kesimpulan hasil uji tidak memenuhi syarat.



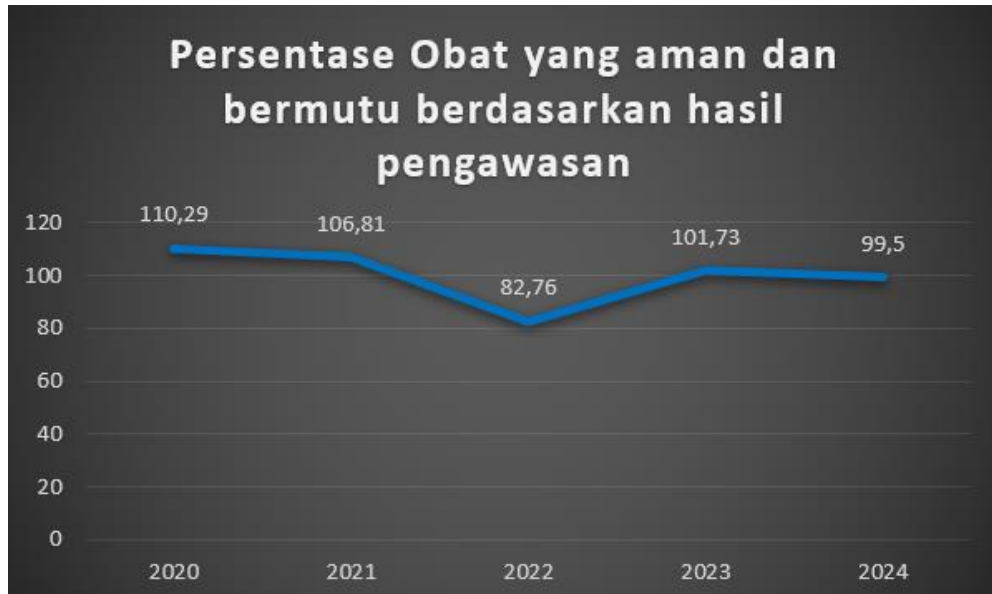
Gambar 3. Tren Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Penyebab dari menurunnya persentase makanan yang memenuhi syarat antara lain hasil uji yang Tidak Memenuhi Syarat Kimia dan Mikrobiologi kemungkinan disebabkan oleh sanitasi higiene dan proses CPPOB pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan, selain itu disebabkan juga karena hasil evaluasi penandaan TMK Mayor yang mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Kegiatan yang menyebabkan kegagalan/penurunan kinerja seperti pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan secara komprehensif untuk memperbaiki proses CPPOB sehingga menyebabkan adanya TMS Produk, selain itu kurangnya perhatian pelaku usaha terhadap peraturan label pangan untuk dapat diimplementasikan pada produknya.

3. IK 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'

Pada tahun 2024 target sampel obat *targeted* Balai POM di Tangerang sebanyak 97 sampel dengan realisasi pada tahun 2024 sebanyak 97 sampel. Realisasi pada tahun 2024, diperoleh sampel obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 83 sampel dari 97 sampel yang telah diperiksa dan diuji.



Gambar 4. Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Penyebab kegagalan/penurunan kinerja yaitu Pengaruh hasil evaluasi penandaan/ label yang mempengaruhi hasil kesimpulan akhir, dimana salah satu komoditi yaitu kosmetik menjadi penyumbang besar, dengan kondisi pada tahap pre market tidak terdapat persetujuan label, serta jumlah sampel kosmetik 59% dari total sediaan farmasi.

Program/kegiatan yang menyebabkan kegagalan / penurunan kinerja seperti kegiatan sosialisasi ataupun bimbingan teknis terkait klaim dan penandaan yang diinisiasi Balai POM Tangerang maupun Badan POM RI tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha, dan tidak diserap dengan baik untuk diimplementasikan.

4. IK 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'

Target sampel makanan *targetted* Balai POM di Tangerang di tahun 2024 sebanyak 38 sampel, pada tahun 2024 telah tersampling 43 sampel dan yang telah diuji sebanyak 43 sampel, dengan rincian 30 sampel Memenuhi Syarat dan 13 sampel Tidak Memenuhi Syarat Mikrobiologi (*coliform* dan *e.coli*) dan kandungan formalin.



Gambar 5. Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Penyebab keberhasilan kinerja adalah optimalnya kemampuan laboratorium dalam pengujian dan kemampuan petugas sampling dalam melakukan pelaporan sehingga pelaporan hasil uji dapat dilakukan sesuai timeline dan ditindaklanjuti sesuai pedoman.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja adalah proses pelaporan dan pengujian yang dilakukan secara tepat waktu dan tidak ada kendala yang berarti sehingga dapat dilakukan sesuai *timeline*.

5. IK 'Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat'.

Target sampel makanan fortifikasi Balai POM di Tangerang di tahun 2024 sebanyak 15 sampel, pada triwulan IV telah tersampling sebanyak 17 sampel terdapat sampel berlebih menyesuaikan instruksi dari pusat terkait tambahan sampel fortifikasi di peredaran untuk garam lokal dan garam nasional. Jumlah yang selesai disampling hingga triwulan IV sebanyak 17 sampel dan seluruhnya Memenuhi Syarat.



Gambar 6. Tren Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Penyebab keberhasilan kinerja adalah optimalnya kemampuan laboratorium dalam pengujian dan kemampuan petugas sampling dalam melakukan pelaporan sehingga pelaporan hasil uji dapat dilakukan sesuai timeline dan ditindaklanjuti sesuai pedoman.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja adalah proses pelaporan dan pengujian yang dilakukan secara tepat waktu dan tidak ada kendala yang berarti sehingga dapat dilakukan sesuai *timeline*.

A.2. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang”

6. IK ‘Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu’

Realisasi indikator kinerja ‘Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu’ Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 89,40 atau tercapai sebesar 99,89% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori ‘cukup’ jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori ‘akan tercapai’ jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 7. Tren Indeks kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu' adalah diantaranya :

1. Pada tahun 2025 target masyarakat yang diintervensi sangat beragam dengan *catchment area* yang bertambah yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, maka ada beberapa target sasaran yang belum tereduksi dengan baik;
2. Terdapat blokir anggaran;
3. Keterbatasan SDM.

Kegiatan yang menyebabkan kegagalan indikator kinerja tersebut :

1. KIE Obat dan Makanan Aman dan Bermutu perlu daya tarik agar jangkauan masyarakat dapat lebih banyak untuk seluruh wilayah pengawasan

A.3. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang”

7. IK 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan'

Realisasi indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 98,46 atau tercapai sebesar 111,89% jika dibandingkan dengan

target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 8. Tren Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan

Faktor penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja :

1. Bimbingan dan pembinaan dari BPOM di Tangerang dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan berjalan secara efektif dan efisien;
2. Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha sesuai dengan jenis bimbingan dan pembinaan yang dibutuhkan pelaku usaha;
3. Narasumber dan petugas yang kompeten dalam pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi terkait obat dan makanan;
2. Melakukan desk CAPA obat dan makanan untuk mendukung penerbitan sertifikat Izin Penerapan CPPOB, sertifikat pemenuhan aspek CPKB, sertifikat CPOTB bertahap dan sertifikat CDOB;
3. Melakukan coaching clinic terkait e-registrasi pangan olahan sebagai bentuk percepatan penerbitan izin edar.

8. IK 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan'

Realisasi indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 86,10 atau tercapai sebesar 98,56% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'cukup' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'akan tercapai' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 9. Tren Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan obat dan makanan

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan' adalah diantaranya :

1. Pada tahun 2025 terdapat perpindahan kewenangan dari BBPOM di Serang untuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, maka beberapa pelaku usaha merasa kesulitan dalam pengurusan perizinan Obat dan Makanan;
2. Terdapat blokir anggaran;
3. Keterbatasan SDM.

Kegiatan yang menyebabkan kegagalan indikator kinerja tersebut yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Publik belum maksimal.

9. IK 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik'

Realisasi indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 95,96 atau tercapai sebesar 103,74% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 10. Tren Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik' adalah diantaranya :

1. Pada tahun 2025 terdapat perpindahan kewenangan dari BBPOM di Serang untuk Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, maka beberapa pelaku usaha merasa kesulitan dalam pengurusan perizinan Obat dan Makanan;
2. Terdapat blokir anggaran;
3. Keterbatasan SDM.

Kegiatan yang menyebabkan kegagalan indikator kinerja tersebut yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Publik belum maksimal.

A.4. Sasaran Kegiatan "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik"

10. IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan'

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh UPT/BPOM yaitu sebanyak 251 dari 319 rekomendasi yang disampaikan.



Gambar 11. Tren Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Waktu yang dialokasikan khusus untuk penerbitan tindak lanjut oleh petugas
2. Update regulasi terbaru terkait tindak lanjut terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada internal Fungsi Pemeriksaan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Membuat memo dari Kepala Balai sebagai reminder triwulan kepada petugas;
2. Membuat data monev rekomendasi yang ditindaklanjuti;
3. Melakukan koordinasi dengan BPOM dan UPT lain dalam follow up tindak lanjut yang harus diterbitkan.

11. IK 'Persentase Keputusan Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan'

Hasil perhitungan realisasi diperoleh dari perbandingan jumlah respon tindak lanjut sebanyak 42 respon dari 49 rekomendasi yang diterbitkan



Gambar 12. Tren Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

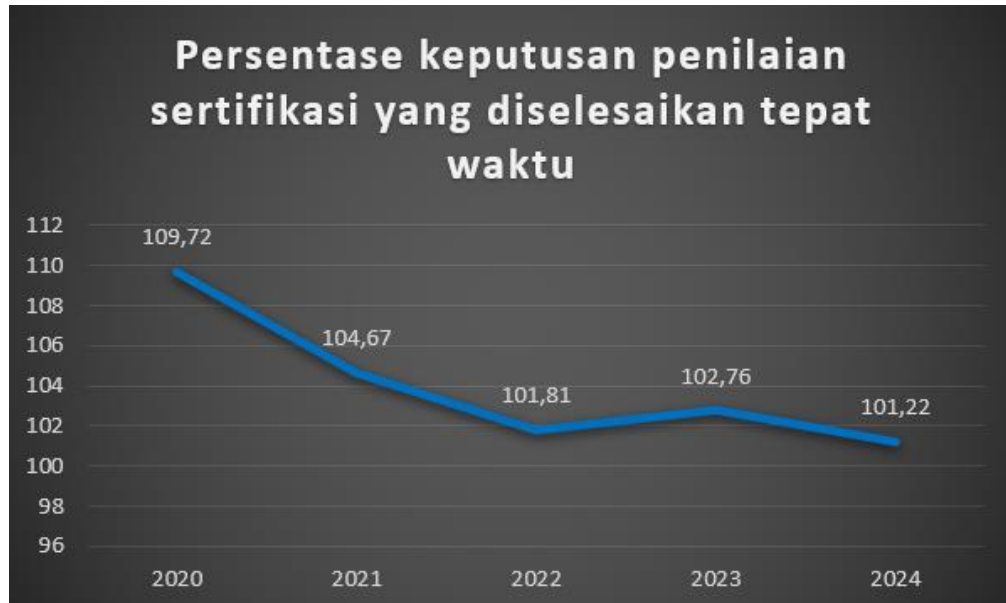
Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini diantaranya adanya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atau menindaklanjuti temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja.

1. Memiliki reminder rutin setiap akhir bulan kepada petugas terkait CAPA dari pelaku usaha;
2. Memiliki reminder rutin setiap akhir bulan kepada petugas terkait CAPA dari lintas sektor.

12. IK 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu'

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 98,18 atau tercapai sebesar 101,22% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 13. Tren Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

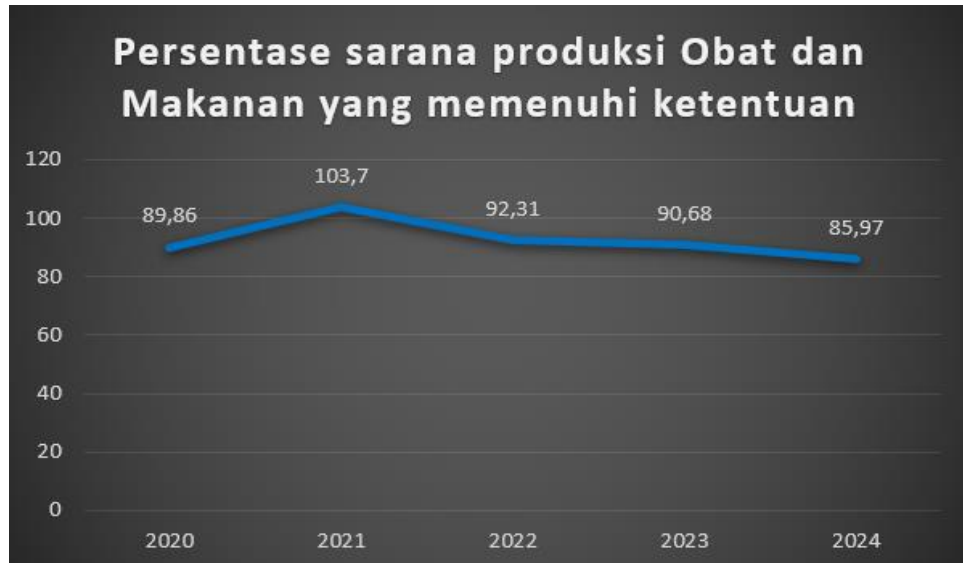
1. Petugas telah terpapar kompetensi yang sesuai
2. Terdapat kemudahan pelaku usaha untuk mendapatkan akses informasi dari berbagai sumber yang telah disediakan BPOM

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Monitoring penerbitan Rekomendasi yang dilakukan secara konsisten
2. Refreshment ulang SOP Penerbitan rekomendasi kepada petugas
3. Kegiatan Desk Pengajuan Rekomendasi yang dilakukan secara berkala

13. IK 'Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'

Sebanyak 136 sarana produksi telah diperiksa sampai dengan triwulan 4 tahun 2024. Sarana dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan sampai dengan triwulan 4 disebabkan oleh Industri Pangan MD (35 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan) industri kosmetik (16 sarana Tidak memenuhi ketentuan) dan industri farmasi/obat 2 sarana tidak memenuhi ketentuan. Produksi Pangan yang diperiksa pada triwulan IV sebanyak 26 sarana dengan hasil 13 sarana Memenuhi Ketentuan dan 13 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. 13 sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan oleh tidak terpenuhinya aspek CPPOB dalam produksi rutin sarana-sarana tersebut. Sementara untuk industri kosmetik yang hasil penilaiannya Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan oleh pemenuhan aspek CPKB yang tidak konsisten.



Gambar 14. Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Penyebab kegagalan / penurunan kinerja

1. Kepatuhan, komitmen dan pengetahuan/pemahaman pelaku usaha terkait penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB relatif masih rendah;
2. Pengetahuan pelaku usaha terkait label/penandaan produk yang sesuai ketentuan yang berlaku masih kurang;
3. CAPA sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya belum diselesaikan hingga akar masalah sehingga terjadi kembali temuan berulang di kemudian hari;
4. Pemahaman terkait segala regulasi/updating regulasi yang terkait obat dan makanan pelaku usaha masih perlu ditingkatkan;
5. Adanya kegiatan di luar perencanaan yang menggeser prioritas pemeriksaan sarana produksi sehingga target jumlah sarana produksi terperiksa baru selesai di Triwulan IV;
6. Pelaksanaan KIE belum efektif dan efisien pada pelaku usaha produksi sehingga kesadaran pelaku usaha meningkat;
7. Adanya blokir anggaran perjalanan dinas di tahun 2024, sehingga ada keterbatasan dalam kegiatan pengawasan di lapangan.

Program / kegiatan yang menyebabkan kegagalan / penurunan kinerja

1. Pada tahun 2024 belum dilakukan sosialisasi Cara Produksi yang Baik kepada pelaku usaha dalam bentuk pertemuan karena adanya pemotongan anggaran, sehingga belum terlaksana peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Produksi yang Baik.

2. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas belum optimal dilakukan sehingga PFM di fungsi pemeriksaan belum seluruhnya mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai jenjangnya

14. IK 'Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan'

Sebanyak 301 sarana distribusi diperiksa sampai dengan triwulan IV 2024, diperoleh data sarana yang paling banyak Tidak Memenuhi Ketentuan yaitu sarana distribusi pangan dan distribusi obat bahan alam. Temuan pada sarana distribusi obat bahan alam berkisar pada temuan terkait produk obat bahan alam Tanpa Izin Edar, produk obat bahan alam mengandung bahan obat dan telah dimasukkan dalam *public warning*. Pada Triwulan IV pemeriksaan banyak berfokus pada pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam dalam rangka intensifikasi pengawasan depot jamu yang sebagian besar hasil pemeriksaannya tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 15. Tren Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Penyebab kegagalan / penurunan kinerja

1. Kesadaran pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum meningkat;
2. Pengetahuan pelaku usaha Obat dan Makanan melalui bimbingan teknis yang menjangkau semua level pelaku usaha belum optimal;
3. Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan dan memberikan solusi terhadap ketidaksesuaian hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan;

4. Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian berbasis kajian risiko cenderung menghasilkan hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan
5. Koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait pendampingan dan pembinaan terhadap sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian belum optimal
6. Kegiatan intensifikasi pengawasan depot jamu sebagian besar hasil pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan.
7. Adanya blokir anggaran perjalanan dinas di tahun 2024, sehingga ada keterbatasan dalam kegiatan pengawasan di lapangan

Program / kegiatan yang menyebabkan kegagalan / penurunan kinerja

1. Pada tahun 2024 belum dilakukan sosialisasi Cara Distribusi yang Baik kepada pelaku usaha dalam bentuk pertemuan karena adanya pemotongan anggaran, sehingga belum terlaksana peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam mengimplementasikan Cara Distribusi yang Baik;
2. Kegiatan peningkatan kompetensi petugas belum optimal dilakukan sehingga PFM di fungsi pemeriksaan belum seluruhnya mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai jenjangnya.

15. IK 'Indeks pelayanan publik'

Realisasi indikator kinerja 'Indeks pelayanan publik' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 3,68 atau tercapai sebesar 103,66% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 16. Tren Indeks pelayanan publik

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja dan anggaran indikator kinerja kinerja 'Indeks Pelayanan Publik' adalah diantaranya pelaksanaan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP).

16. IK 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik'

Realisasi indikator kinerja 'Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 100,00 atau tercapai sebesar 119,76% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 17. Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan Dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Terbitnya seluruh sertifikat Izin Penerapan CPPOB, sertifikat pemenuhan aspek CPKB dan sertifikat CPOTB bertahap oleh UMK yang didampingi Tahun 2024
2. Petugas pendampingan UMK yang kompeten
3. Komitmen pelaku usaha yang tinggi dalam menyelesaikan seluruh tahapan pendampingan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Melakukan Penetapan Target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dengan melibatkan lintas sektor
2. Melakukan Bimtek Penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB
3. Fasilitasi dalam rangka pendampingan pemenuhan aspek CPOTB, CPKB dan CPPOB
4. Melakukan Sertifikasi CPOTB, CPKB dan CPPOB
5. Melakukan coaching clinic e-sertifikasi dan coaching clinic e-registrasi CPOTB, CPKB dan CPPOB

17. IK 'Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota'

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 100,00 atau tercapai sebesar 105,26% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 18. Tren Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan dan minuman serta program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Kerjasama yang telah terbangun secara baik dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang dibuktikan dengan telah memiliki SK Bupati/Walikota terkait TPPOM dan TPPS;
2. Masing-masing aspek ditunjuk PIC terpisah sehingga beban kerja masing-masing PIC optimal;
3. Adanya DAK yang diterima oleh 2 Kabupaten/Kota di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan bersama pemerintah daerah secara terpadu;
2. Optimalisasi pengawasan bersama dengan lintas sektor

A.5. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan”

18. IK ‘Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan’

Realisasi indikator kinerja ‘Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan’ Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 96,51 atau tercapai sebesar 101,38% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori ‘sangat baik’ jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori ‘melampaui’ jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 19. Tren Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Faktor penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja dan anggaran indikator kinerja ‘Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan’ diantaranya adalah :

1. Penyusunan strategi yang tepat sasaran;

2. Pemanfaatan media yang efektif;
3. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan;
4. Metode penyampaian yang interaktif.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut :

1. KIE di media sosial, elektronik, dan cetak;
2. Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan;
3. Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan dan Sosialisasi Penyalahgunaan;
4. Obat-Obat Tertentu (OOT);
5. Bimbingan Kader Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
6. Kampanye Keamanan Pangan di Pasar;
7. Bimbingan Teknis Komunitas Desa;
8. Narasumber Sosialisasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB);
9. Forum Komunikasi Publik (FKP) Standar Pelayanan dan Sosialisasi Produksi dan Edarkan Pangan Olahan yang Aman;
10. Narasumber Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Penyintas Kekerasan;
11. Narasumber Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji.

19. IK 'Jumlah sekolah dengan pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman'

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 4 sekolah atau tercapai sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 20. Tren jumlah sekolah dengan pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan pangan jajan anak sekolah (PJAS) aman' adalah adanya kerja sama antar stakeholder yang terkait dalam PJAS Aman berjalan dengan baik.\

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut :

1. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah;
2. Pemberian Paket Edukasi;
3. Monitoring Kader Keamanan Pangan Sekolah.

20. IK 'Jumlah desa pangan aman'

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 1 desa pangan aman atau tercapai sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 21. Tren jumlah desa pangan aman

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' adalah :

1. Kerja sama antar stakeholder yang terlibat dalam setiap tahapan intervensi desa pangan aman berjalan dengan baik;
2. Kader keamanan pangan desa aktif;
3. Komunitas desa aktif.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut :

1. Menjalin hubungan yang baik dengan setiap stakeholder dengan selalu melakukan follow up terkait dengan keterlibatan seluruh stakeholder pada setiap tahapannya;
2. Bimbingan Teknis Kader Pangan Aman Desa;
3. Bimbingan Teknis Komunitas Desa;
4. Fasilitasi Keamanan Pangan Desa Tahap I dan II;
5. Pengawasan Keamanan Pangan Desa Tahap I dan II;
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
7. Mengikuti Lomba Desa Pangan Aman.

21. IK 'Jumlah pasar aman berbasis komunitas'

Realisasi indikator kinerja 'Jumlah pasar aman berbasis komunitas' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 1 pasar aman atau tercapai sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 22. Tren jumlah pasar aman berbasis komunitas

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja 'Jumlah pasar aman berbasis komunitas' adalah :

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang mencangkup target pelaksanaan;
2. Kerja sama stakeholder berjalan baik.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Tangerang dalam mendukung indikator kinerja tersebut :

1. Survei Pasar;
2. Bimtek Pengelola Pasar;
3. Pendampingan Sampling dan pengujian Tahap 1;
4. Kampanye Keamanan Pangan;
5. Bimtek Pedagang Pasar;
6. Pendampingan Sampling dan pengujian Tahap 2;
7. Monitoring dan evaluasi;
8. Laporan ke stakeholder terkait.

A.6. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan”

22. IK ‘Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar’

Realisasi indikator kinerja ‘Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar’ Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 50,00 atau tercapai sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori ‘baik’ jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori ‘melampaui’ jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 23. Tren Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tercapainya indikator kinerja ‘Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar’ oleh seluruh unit pelaksana teknis pada klaster 3 sebesar 100,00% dikarenakan adanya:

1. Koordinasi dengan balai penguji terkait rencana pelaksanaan sampling dengan ketersediaan reagen di laboratorium;
2. Sampling dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;

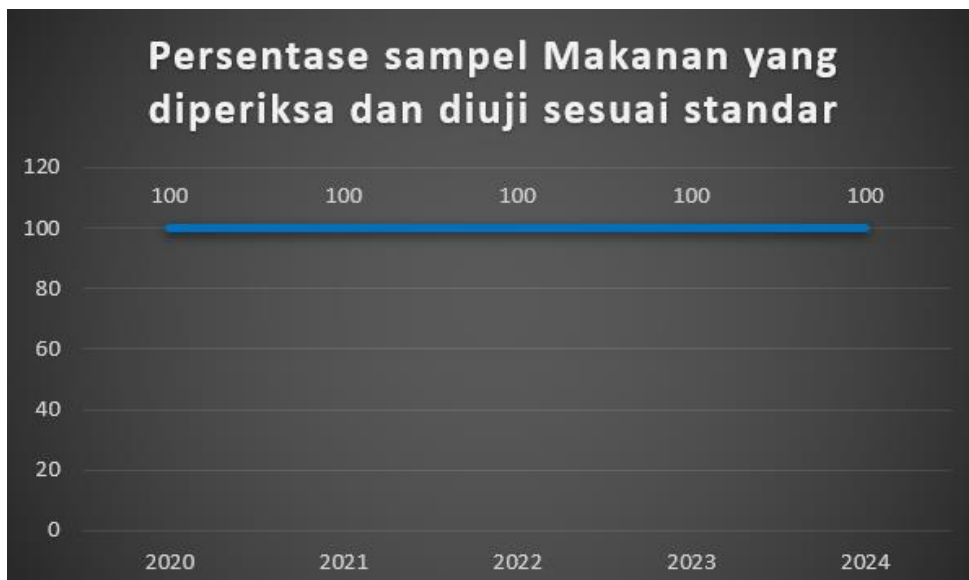
3. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi capaian sampling setiap bulan.

Tercapainya indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar' oleh seluruh unit pelaksana teknis pada klaster 3 sebesar 100,00% dibantu oleh:

1. Sampling makanan perbulan sesuai perencanaan;
2. Update pada bit.ly untuk capaian sampling per bulan;
3. Terdapat PIC yang bertanggungjawab terhadap pengisian link bit.ly.

23. IK 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar'

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 50,00 atau tercapai sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 24. Tren Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai

Tercapainya indikator kinerja 'Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar' oleh seluruh unit pelaksana teknis pada klaster 3 sebesar 100,00% dikarenakan adanya:

1. Koordinasi dengan balai penguji terkait rencana pelaksanaan sampling dengan ketersediaan reagen di laboratorium;
2. Sampling dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat;
3. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi capaian sampling setiap bulan.

Tercapainya indikator kinerja 'Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar' oleh seluruh unit pelaksana teknis pada klaster 3 sebesar 100,00% dibantu oleh:

1. Sampling makanan perbulan sesuai perencanaan;
2. Update pada bit.ly untuk capaian sampling per bulan;
3. Terdapat PIC yang bertanggungjawab terhadap pengisian link bit.ly.

A.7. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan”

24. IK 'Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan'

Realisasi indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 77,50 atau tercapai sebesar 112,32% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 25. Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

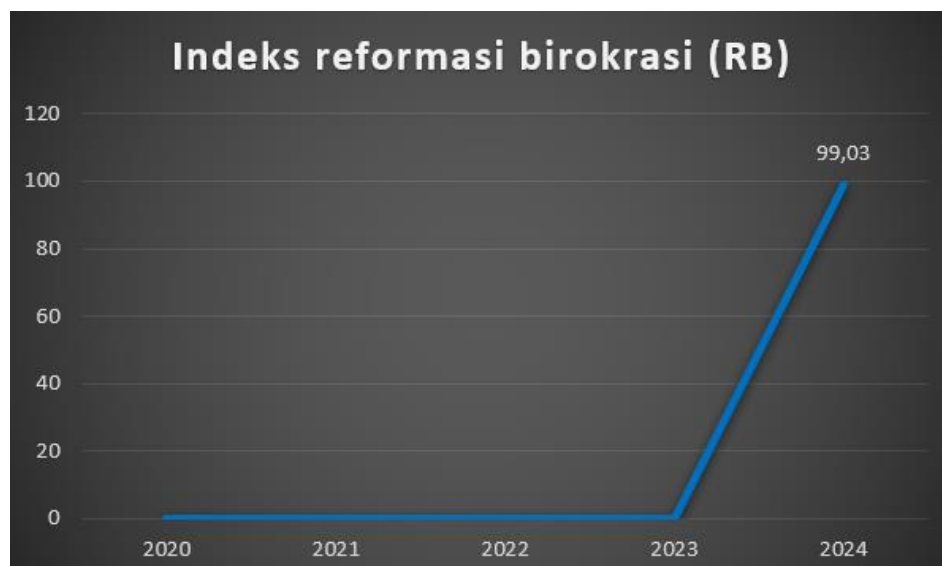
Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Balai POM di Tangerang dapat memenuhi target kinerja tahun 2024 disebabkan ketepatan dalam perencanaan di awal tahun, sehingga kegiatan penindakan dapat terarah dan sesuai dengan target di akhir tahun 2024. Selain itu dikarenakan hubungan baik yang terjalin dengan lintas sektor utamanya *Criminal Justice System* sehingga proses penyidikan hingga pemberkasan dapat berjalan dengan sangat baik.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya percepatan proses Tahap 2 dengan Kejaksaan Tinggi Banten, dengan melakukan koordinasi yang intensif sehingga penyidik mendapat kepastian waktu Tahap 2.

A.8. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tangerang yang optimal”

25. IK ‘Indeks Reformasi Birokrasi’

Realisasi indikator kinerja ‘Indeks Reformasi Birokrasi’ Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 74,27 atau tercapai sebesar 99,03% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori ‘cukup’ jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori ‘akan tercapai’ jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 26. Tren Indeks reformasi birokrasi (RB)

Penyebab kegagalan / penurunan kinerja :

1. Telah terdapat rencana pembangunan ZI unit kerja namun program prioritas masih terbatas pada program kerja Agent of Change (AoC), belum menyeluruh pada masing-masing area perubahan.
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI namun masih sebatas kertas kerja spreadsheet, belum berupa dokumen formal yang diotorisasi pimpinan unit kerja, serta monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI belum sepenuhnya melibatkan pimpinan.
3. Belum membangun dan menerapkan inovasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pada area perubahan tata laksana yang berdampak pada perbaikan kinerja.

4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik belum dilakukan secara berkala.
5. Rotasi dan mutasi pegawai belum mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai serta belum dilakukan monitoring secara memadai.
6. Belum memiliki kebijakan internal dan bukti implementasi bahwa penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment.
7. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
8. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan.
9. Laporan Kinerja (Lapkin) belum menyajikan informasi tentang efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai.
10. Belum terdapat kebijakan internal dan mekanisme pemberian reward and punishment bagi individu pegawai, petugas pelayanan publik maupun bagi fungsi atau tim kerja.
11. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi pengendalian gratifikasi, selain itu public campaign tentang pengendalian gratifikasi belum menunjukkan keberkalaan.
12. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat namun demikian belum diformalkan dalam bentuk laporan secara periodik dan berkesinambungan.

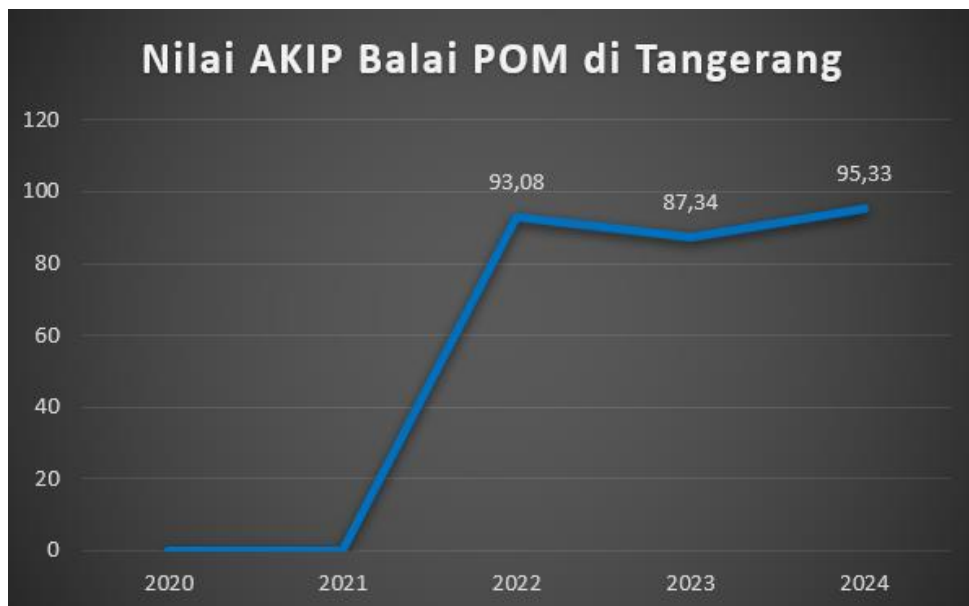
Program / kegiatan yang menyebabkan kegagalan / penurunan kinerja :

1. Telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama namun belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil identifikasi tersebut.
2. Telah terdapat pelayanan yang dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.
3. Telah terdapat kebijakan dan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan namun demikian belum terdapat bukti implementasi atas kebijakan tersebut.
4. Telah terdapat upaya peningkatan pelayanan publik antara lain WhatsApp Chatbot dan DIVA (Drive Thru Pengujian Sampel) namun pembangunan inovasi tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan latar belakang kebutuhan stakeholder, serta belum terdapat laporan yang menyajikan dampak before-after atas diterapkannya inovasi tersebut.

5. SKM mandiri telah dilakukan secara periodik per triwulan, serta telah melakukan SKM tahunan yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi namun demikian baru dilakukan tindak lanjut atas hasil SKM tahunan sedangkan atas SKM mandiri belum ditindaklanjuti.

26. IK 'Nilai AKIP'

Realisasi indikator kinerja 'Nilai AKIP' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 75,34 atau tercapai sebesar 95,33% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'cukup' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'akan tercapai' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 27. Tren Nilai AKIP

Penyebab kegagalan kinerja (tidak mencapai target) dalam indikator tersebut yaitu :

1. Perencanaan
 - a) Perubahan target indikator pada dokumen PK telah didukung dengan matriks reviu target indikator (Matriks A2), namun perubahan target tersebut tidak disertai dengan kertas kerja perhitungan berdasarkan basis data atau analisa yang memadai serta belum diformalkan oleh Kepala Satker.
 - b) Perencanaan kinerja telah diinput dalam aplikasi Simetris dan RAPK, namun terdapat beberapa IKU yang tidak diinput pada aplikasi Simetris dan RAPK sesuai dengan frekuensi target yang telah ditetapkan pada Manual IKU, seperti:

- 1) Target Indikator Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Manual IKU mulai dari B07 namun baru diinput B10.
- 2) Target Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan berdasarkan Manual IKU mulai dari B01 namun baru diinput B03.

2. Pengukuran

- a) Telah memiliki SOP Pengumpulan Data Kinerja namun belum terdapat informasi sumber data pengumpulan kinerja yang valid dan mudah telusur, yang dilengkapi dengan kertas kerja pengukuran data kinerja, proses verifikasi dan pengesahan atas data yang telah dikumpulkan sebelum dikumpulkan ke pusat, media pengumpulan data kinerja, proses penyusunan laporan evaluasi atau laporan kinerja interim dan mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data yang meliputi tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan, tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan dan tahap perbaikan pelaporan data.
- b) Keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat *monitoring* dan evaluasi internal belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dan penanggung jawab kinerja Satker terutama untuk mengukur capaian kinerja.
- c) Belum disusun Surat Keputusan/mechanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang telah mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi.

3. Pelaporan

- a) Pada Laporan Kinerja telah memuat capaian indikator dan realisasi anggaran serta telah menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dengan membandingkan antara capaian output dan anggaran pada masing-masing Indikator kinerja namun belum terdapat penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai masing-masing capaian sasaran/indikator kinerja/kegiatan.
- b) Terdapat penyajian pemanfaatan informasi kinerja namun berupa penjelasan capaian kinerja pada indikator tersebut dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja yang mana merupakan bagian dari rencana aksi yang telah dijabarkan bukan pemanfaatan dari informasi kinerja masing-masing indikator.

- c) Laporan Kinerja Triwulan II 2024 belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya.
- d) Pelaporan pada aplikasi *e-performance (simetris)* belum dilakukan secara tertib, lengkap dan detil mengenai kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut.
- e) Pada Laporan Kinerja Tahun 2023, Indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat capaiannya tidak memenuhi target namun belum menyajikan rekomendasi, tindak lanjut, kondisi sebelum dan setelah rencana aksi, yang disajikan adalah tabel rekomendasi untuk Indikator "Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu".

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Namun masih terdapat kelemahan yaitu Laporan Evaluasi Internal (LEI) tahun 2024 belum menyajikan hasil analisis capaian kinerja terutama terkait adanya permasalahan/kendala/hambatan yang menghambat capaian kinerja per masing-masing IKU dan atau LEI belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya. Selain itu, rekomendasi atas capaian yang tidak memenuhi target pada tahun 2023 tidak dilakukan monitoring dan evaluasi di Triwulan I 2024.

Secara umum, seluruh program dalam menunjang ketercapaian nilai AKIP Balai POM di Tangerang telah dilakukan, namun memerlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk meningkatkan nilai AKIP.

27. IK 'Nilai Pengelolaan Kearsipan'

Realisasi indikator kinerja 'Nilai Pengelolaan Kearsipan' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 86,16 atau tercapai sebesar 105,72% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 28. Tren Nilai Pengelolaan kearsipan

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Pengelola arsip telah memahami dan menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan pedoman kearsipan lainnya
2. Pengelola arsip telah mengikuti pelatihan kearsipan yang dilaksanakan oleh Biro Umum maupun pelatihan yang tersedia di IDEAS

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Melakukan verifikasi atas penciptaan arsip agar tetap sesuai dengan Tata Naskah Dinas
2. Melakukan tindak lanjut atas temuan pengawasan kearsipan tahun 2024

28. IK 'Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa'

Realisasi indikator kinerja 'Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 95,00 atau tercapai sebesar 125,10% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 29. Tren Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

1. RUP diumumkan secara maksimal;
2. Penyelesaian paket pekerjaan pada laman LPSE.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

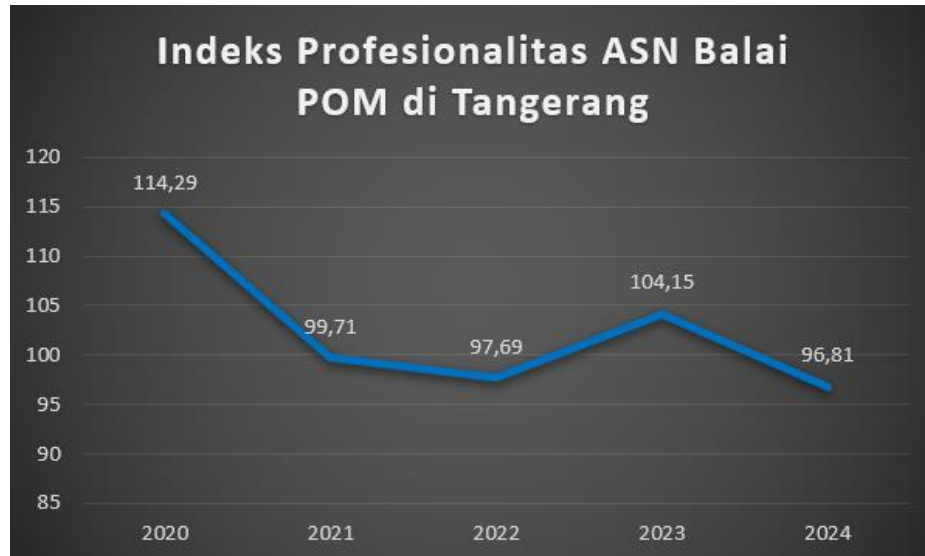
Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja

1. Mengumumkan RUP secara maksimal;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing.

A.9. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal”

29. IK ‘Indeks Profesionalitas ASN’

Realisasi indikator kinerja ‘Indeks Profesionalitas ASN’ Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 85,71 atau tercapai sebesar 96,81% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori ‘cukup’ jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori ‘akan tercapai’ jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 30. Tren Indeks Profesionalitas ASN

Penyebab kegagalan / penurunan kinerja :

1. Terdapat 1 pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural
2. Terdapat 1 pegawai belum mengikuti diklat fungsional
3. Terdapat 1 pegawai sudah mengikuti diklat fungsional namun nilainya belum masuk ke aplikasi IP ASN
4. Target yang diberikan terlalu tinggi, karena seluruh UPT BPOM tidak ada yang mencapai target di tahun 2024

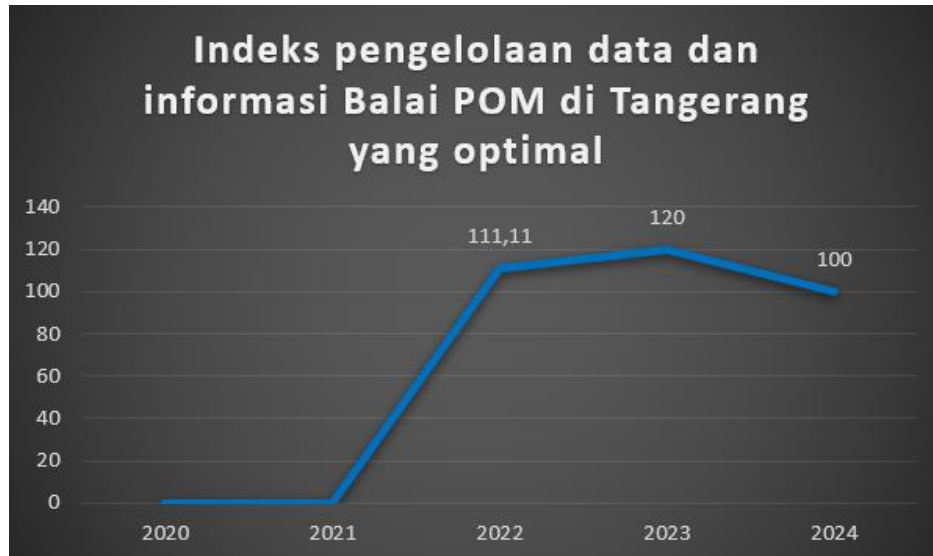
Program / kegiatan yang menyebabkan kegagalan / penurunan kinerja :

1. Terbatasnya kegiatan diklat struktural dan diklat fungsional di tahun 2024 untuk diikuti oleh pegawai yang belum diklat
2. Target yang diberikan terlalu tinggi, karena seluruh UPT BPOM tidak ada yang mencapai target di tahun 2024

A.10. Sasaran Kegiatan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”

30. IK ‘Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tangerang yang optimal’

Realisasi indikator kinerja ‘Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tangerang yang optimal’ Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 3,00 atau tercapai sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori ‘baik’ jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori ‘melampaui’ jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



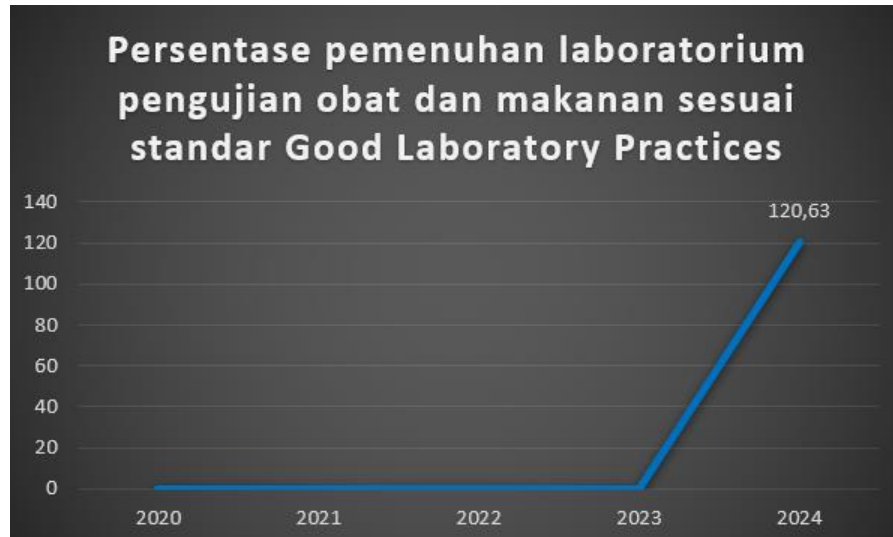
Gambar 31. Tren Indeks Pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tangerang yang optimal

Tercapainya target indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tangerang yang optimal' tahun 2024 sebesar 100,00% disebabkan oleh konsistensi dalam pemanfaatan email, *sharing folder*, *dashboard* BOC Balai, Berita Aktual pada Subsite Balai.

Tercapainya target indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tangerang yang optimal' tahun 2024 sebesar 100,00% karena dibantu oleh program/kegiatan monitoring dan pengingat yang ditujukan kepada seluruh pegawai untuk memanfaatkan email, *sharing folder*, *dashboard* BOC Balai, Berita Aktual pada Subsite Balai secara konsisten.

31. IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar *Good Laboratory Practices*'

Realisasi indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar *Good Laboratory Practices*' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 48,25 atau tercapai sebesar 120,63% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 32. Tren Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar Good Laboratory Practices

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja :

1. Pengadaan alat dilakukan sesuai dengan peralatan laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN) untuk standar laboratorium level 1;
2. Melakukan pengembangan kompetensi bagi personil pengujian;
3. Meningkatkan ruang lingkup pengujian.

Program/kegiatan pengadaan alat dilakukan sesuai dengan peralatan laboratorium yang telah direkomendasikan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN) untuk standar laboratorium level 1

1. Melakukan pengembangan kompetensi bagi personil pengujian
2. Meningkatkan ruang lingkup pengujian

A.11. Sasaran Kegiatan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal”

32. IK ‘Nilai Kinerja Anggaran’

Realisasi indikator kinerja ‘Nilai Kinerja Anggaran’ Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 96,14 atau tercapai sebesar 105,95% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori ‘sangat baik’ jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori ‘melampaui’ jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Realisasi NKA tersebut terdiri dari nilai EKA sebesar 96,47 dan IKPA sebesar 95,80 dengan kontribusi EKA dan IKPA sebesar 50%.



Gambar 33. Tren Nilai Kinerja Anggaran

Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja pada indikator 'Nilai Kinerja Anggaran' diantaranya :

1. Pelaporan capaian *output* telah dilaksanakan tepat waktu dan terkonfirmasi;
2. Komponen IKPA pada masing-masing aspeknya telah terpenuhi dengan nilai yang memadai;
3. Komponen EKA telah terpenuhi dengan nilai yang memadai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/peningkatan kinerja diantaranya kegiatan evaluasi internal bersama Kepala Balai yang dilaksanakan setelah periode kinerja berakhir.

33. IK 'Nilai pengelolaan barang milik negara'

Realisasi indikator kinerja 'Nilai pengelolaan barang milik negara' Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 93,04 atau tercapai sebesar 100,04% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'sangat baik' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 34. Tren Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja :

1. Laporan BMN disampaikan tepat waktu
2. Usulan RkBMN disampaikan tepat waktu
3. Pengajuan PSP BMN atas aset Balai POM di Tangerang diajukan tepat waktu
4. Terdapat pemusnahan persediaan terhadap barang persediaan dalam kondisi usang.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / peningkatan kinerja :

1. Dilakukan perencanaan pengadaan Barang Milik Negara Balai POM di Tangerang
2. Dilakukan pencatatan aset dalam aplikasi SAKTI dan melengkapi aset dengan label BMN
3. Dilakukan update Daftar Barang Ruangan secara berkala
4. Dilakukan pencatatan keluar-masuk barang persediaan dalam aplikasi SAKTI
5. Dilakukan monitoring terhadap Barang Milik Negara berupa persediaan yang dituangkan dalam kartu stok dan aplikasi SAKTI.
6. Dilakukan rekonsiliasi bulanan antar BMN dan keuangan.

34. IK 'Persentase realisasi belanja produk dalam negeri'

Realisasi indikator kinerja 'Persentase realisasi belanja produk dalam negeri'

Balai POM di Tangerang tahun 2024 sebesar 99,07 atau tercapai sebesar 165,12% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. Capaian berada pada kategori 'tidak dapat disimpulkan' jika dibandingkan dengan target triwulan IV dan berada pada kategori 'melampaui' jika dibandingkan dengan target tahun 2024.



Gambar 35. Tren Persentase Realisasi belanja produk dalam negeri

Penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja :

1. Pegawai yang terlibat dalam pengadaan PPK dan Pejabat Pengadaan selalu mengikuti pelatihan terkait pengadaan barang dan jasa
2. Komitmen PPK dan Pejabat Pengadaan untuk mengutamakan memilih barang dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi dan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja 'Persentase realisasi belanja produk dalam negeri' tertinggi pada klaster 3 diraih oleh Balai POM di Tangerang dengan capaian 165,12% didukung oleh proses pemilihan barang oleh Pejabat Pengadaan dan PPK mengutamakan memilih barang dengan tingkat kompeten dalam negeri yang tinggi.

1.1.2. ASPIRASI STAKEHOLDER

Masyarakat Tangerang Raya memiliki aspirasi besar terhadap Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang sebagai penjaga keamanan produk yang mereka konsumsi setiap hari. Harapan dari masyarakat Balai POM Tangerang semakin memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat, makanan, dan kosmetik agar hanya produk yang aman dan bermutu yang sampai ke tangan konsumen. Selain itu, diharapkan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses, serta peningkatan edukasi mengenai keamanan pangan dan obat. Harapan lainnya adalah agar Balai POM Tangerang terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari produk berisiko.

Pada triwulan III tahun 2025, telah dilakukan survei kepuasan masyarakat oleh fungsi infokom Balai POM di Tangerang terhadap 231 responden yang memberikan kritik / saran dan / atau harapan sebagai berikut :

No.	Responden	Kritik/Saran	Harapan	Apresiasi	Keterangan
1	6	-	-	Pelayanan yang saya terima sangat cepat dan petugas memberi informasinya juga jelas	Respon positif
2	10	-	Semoga Balai / Badan POM bisa lebih responsif terhadap pertanyaan masyarakat melalui email atau WhatsApp	-	Respon positif
3	92	-	-	Terima kasih sangat membantu	Respon positif
4	102	-	-	cukup kooperatif dan jelas dalam menjelaskan	Respon positif
5	115	-	-	Sudah keren	Respon positif
6	116	-	Maju terus BPOM Tangerang	-	Respon positif
7	125	-	-	Kegiatan berjalan dengan baik	Respon positif
8	127	-	-	Sudah cukup baik	Respon positif
9	132	-	-	senanggg	Respon positif
10	136	pembuatan FORM, SOP, dan MAN harus dibuatkan template resmi dan contoh pengisiannya (panduannya) yang lengkap. saya disarankan untuk melengkapi pengisian SOP pemeliharaan bangunan, di link google drive yang diberikan sebelumnya tidak ada templatnya tapi akhirnya baru dikasih. lebih baik jika penjelasan dibuatkan dalam panduan video untuk tiap pembuatan SOP, FORM, dan MAN.	-	pendampingan dan bimtek seperti ini sangat amat berguna bagi kami pelaku usaha yang sedang mengurus perizinan CPOB. Terima kasih banyak, overall baik sekali acaranya. pelayanannya sangat amat baik. jika ada bimtek lagi untuk pelaku usaha, saya sangat antusias untuk bisa ikut.	Saran
11	139	-	Semoga UMKM semakin berkembang	-	Respon positif
12	140	-	-	penyampaian yang mudah dimengerti dan di fahami	Respon positif
13	159	-	-	Terimakasih	Respon positif
14	160	-	-	terima kasih atas kegiatannya	Respon positif
15	170	-	-	Sangat membantu semoga kedepannya semakin lebih baik lagi	Respon positif
16	193	Respon via WA/hotline lebih diperpanjang waktu pelayanannya, WA > 949 > sertifikasi	-	-	Saran
17	194	-	-	Cukup baik	Respon positif
18	207	-	-	pelayanannya cukup baik	Respon positif
19	219	-	-	Terima kasih	Respon positif
20	229	Semoga sinkronisasi antara web dan dokumen asli bisa lebih efisien	-	-	Respon positif

Responden memberikan saran, harapan, dan apresiasi terhadap layanan Balai POM di Tangerang. Saran terkait pembuatan template SOP, form, dan manual mutu, serta penjelasan mengenai pembuatan dokumen melalui video. Solusi yang dapat dilakukan adalah melengkapi format SOP, form, dan manual mutu, serta mempublikasi *e-learning* IDEAS untuk pelaku usaha. Sedangkan untuk saran terkait perpanjang respon *WhatsApp Hotline*, Balai POM di Tangerang menyediakan inovasi layanan *WhatsApp* 24 jam, yaitu Lewat Media Online Obat dan Makanan (LeMON) melalui *WhatsApp* 0811-9760-079. Saran terkait sinkronisasi

antara web dan dokumen. Dikarenakan terkait kendala sistem bukan merupakan ranah Balai POM di Tangerang, sehingga solusi yang dapat dilakukan adalah menjadi narahubung ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPOM apabila terdapat pelaku usaha yang terkendala.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang meliputi tiga Kota dan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dimana Provinsi Banten merupakan Provinsi yang berbatasan dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat industri dan perdagangan, sehingga peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang ada sangat beragam. Produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tangerang harus lebih komprehensif mencakup peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Balai POM di Tangerang dalam melakukan pengawasan.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang juga menuntut Balai POM di Tangerang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Tangerang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Tangerang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Tangerang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

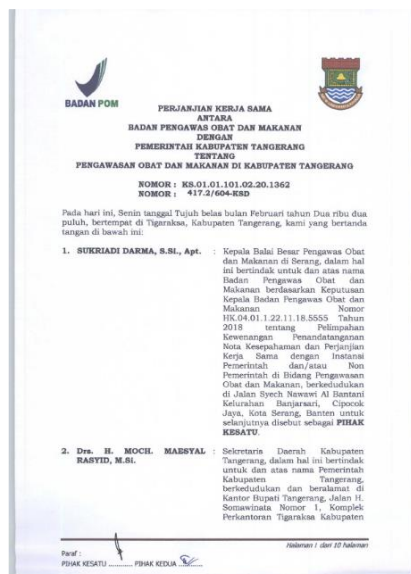
KEKUATAN (STRENGTH)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BPOM di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Tangerang, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Koordinasi dengan lintas sektor berjalan dengan baik

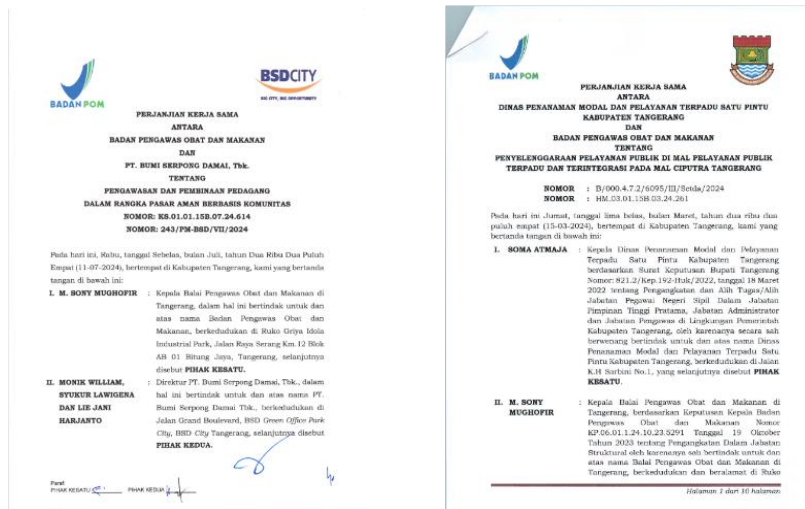
Perjanjian Kerja Sama tanggal 17 Februari 2020 Antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Tangerang. Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, label dan iklan produk tembakau, serta pengawasan fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

Surat Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya POM Tingkat Cabang Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2021 – 2026. Surat Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan SAKA POM di Kabupaten Tangerang.

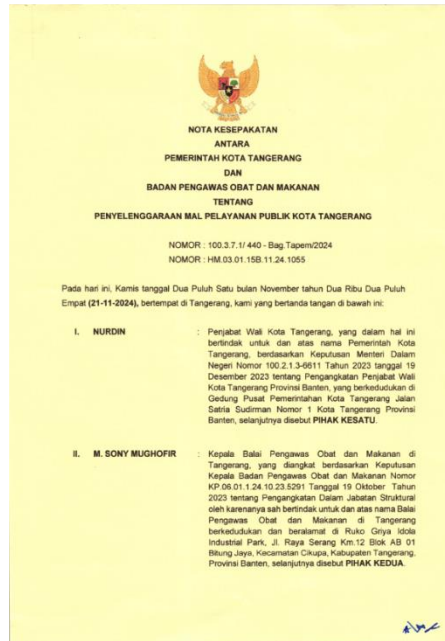


Perjanjian Kerjasama dengan lintas sektor tanggal 15 Maret 2024 Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diwakili oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi Pada Mal Ciputra Tangerang. Dengan adanya perjanjian Kerjasama ini, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang turut aktif dalam melakukan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Mall Ciputra Citra Raya. Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang dilaksanakan setiap Hari Senin dan Rabu di setiap minggunya dari pukul 10.00 – 16.00 WIB.

MoU atau perjanjian kerjasama Balai POM di Tangerang dengan dengan lintas sektor yaitu pada tanggal 11 Juli 2024 Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diwakili Oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang dan PT Bumi Serpong Damai, Tbk tentang Pengawasan dan Pembinaan Pedagang Dalam Rangka Pasar Aman Berbasis Komunitas. Dengan adanya perjanjian Kerjasama ini Balai POM di Tangerang dan Pasar Modern BSD City akan melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan khususnya di Pasar Modern BSD City, meningkatkan komitmen pedagang pasar dalam rangka meningkatkan keamanan, mutu dan gizi pangan yang diedarkan di lingkungan Pasar Modern BSD City serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian Masyarakat di Pasar Modern BSD City.



MoU atau Nota Kesepakatan dengan lintas sektor tanggal 21 November 2024 Antara Pemerintah Kota Tangerang dan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diwakili oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang. Dengan adanya perjanjian Kerjasama ini, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang turut aktif dalam melakukan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang. Pelayanan Publik Kota Tangerang dilaksanakan setiap Hari Rabu dan Jumat di setiap minggunya dari pukul 08.30 – 15.00 WIB. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.



2. Edukasi masyarakat dan pendampingan pelaku usaha
Kegiatan yang dilakukan Balai POM di Tangerang seperti :
 - 1) Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan melalui media sosial dan berkoordinasi dengan lintas sektor, untuk menjaring data umkm yang akan didampingi;
 - 2) Melaksanakan penetapan target sesuai dengan ketentuan;
 - 3) Kegiatan Bimtek yang bersinergi dengan Orang Tua Angkat.
 - 4) Melaksanakan Pendampingan secara intensif kepada UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik
 - 5) Kolaborasi dengan Universitas Prasetya Mulya melalui kegiatan penyuluhan bertema “Sinergi Manajemen dan Keamanan Pangan Menuju UMK Unggul”
3. Saluran komunikasi publik yang dikelola dengan baik
 - 1) PINTAS (Pusat Informasi Obat dan Makanan Terintegrasi)
Dapatkan kemudahan informasi tentang sediaan farmasi dan makanan melalui link yang dapat diakses dimanapun berada, yaitu <https://linktr.ee/bpomtangerang>
 - 2) SI MOBI (Sistem Informasi dan Mobil Edukasi Obat dan Makanan)
SI MOBI adalah inovasi layanan informasi/pengaduan atau sertifikasi Obat dan Makanan melalui mobil edukasi dan sertifikasi Obat dan Makanan.
 - 3) Cendol Dawet (Cek Data Online Dapatkan Izin Edar Terkini)
Dapatkan informasi terkait izin edar Obat dan Makanan melalui link yang dapat diakses dimanapun berada, yaitu <https://linkfly.to/cendoldawet>
 - 4) LeMON (Lewat Media Online tentang Obat dan Makanan)

LeMON adalah program WhatsApp Chatbot yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkini terkait Obat dan Makanan.

5) TANYA OMA (Tanya Jawab Obat dan Makanan)

Inovasi layanan publik tentang sediaan farmasi dan makanan yang berisi tanya jawab tentang Obat dan Makanan, misal peraturan, cara sertifikasi, cara pendaftaran produk, cara melakukan pengaduan dan lain-lain. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen yang datang di Balai POM di Tangerang diidentifikasi, sehingga jawaban dari pertanyaan yang sering muncul dapat mudah diakses oleh pengguna.

4. BMN dikelola dengan baik

Dikelolanya BMN dengan baik oleh Balai POM di Tangerang sehingga meraih penghargaan dari Kepala Badan POM RI pada tanggal Juni 2023 sebagai Juara 2 Satuan Kerja Terbaik di Bidang Pengelolaan BMN di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 (Kategori Satuan Kerja Loka POM)

5. Memiliki inovasi dan penghargaan

Dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Kinerja Balai POM di Tangerang melakukan serangkaian inovasi untuk meningkatkan efektifitas komunikasi baik internal maupun eksternal. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya yaitu :

1) GerCep Sertifikasi

Gerak Cepat Sertifikasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan percepatan pendaftaran izin edar produk sediaan farmasi dan makanan.

2) JEMPOL (JEMput bola Pengujian On Location)

JEMPOL adalah program jemput bola pengujian pangan dengan Mobil Laboratorium keliling Balai POM di Tangerang. Program ini bertujuan untuk memastikan pangan aman dari bahan berbahaya, yaitu dengan melakukan pengujian secara gratis terhadap sampel pangan yang dibawa secara suka rela oleh masyarakat.

Pengujian menggunakan rapid test kit terhadap parameter 4 (empat) yang sering disalahgunakan pada pangan, yaitu boraks, rhodamin B, metanil yellow. Masyarakat dapat mengujikan pangan terhadap parameter 4 (empat) bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan secara gratis.

3) Si Dasi (Arsip Dokumentasi)

Si Dasi merupakan sistem penyimpanan dokumentasi kegiatan berupa foto/video. Tujuannya untuk merapikan dan penyimpanan secara konsisten, sehingga membantu ketika dibutuhkan data dukung dokumentasi atau dalam pembuatan media informasi dan edukasi.

- 4) Aplikasi Pesan Terjadwal SKEdit untuk mengingatkan pelaku usaha mengirimkan Tindakan Perbaikan/Pencegahan CAPA sebelum batas waktu terlewati
- 5) Gemilang Intensifikasi, merupakan kegiatan intensifikasi dalam pengawasan sarana produksi pangan
- 6) Video Profil Loka POM di Kabupaten Tangerang tahun 2020
- 7) Video / iklan layanan masyarakat tentang Penerapan CPPOB
- 8) *Google drive* pemantauan *timeline* alur sertifikasi di fungsi pemeriksaan dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi pada alamat <https://bit.ly/MonevSertif25> dan <https://linktr.ee/SertifikasiLokaPOMTangerang>



Gambar 8. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Sucofindo



Gambar 9. Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh TUV Rheinland

Balai POM di Tangerang berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2021 sd. 2024 diantaranya :

- Balai POM di Tangerang telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu /Quality Management System di Lingkungan Balai POM di Tangerang dan mempertahankan sertifikat tersebut pada tahun 2021 dalam Audit Surveillance ISO 9001:2015
- Satker Paling Aktif I Kontribusi Video terbanyak dalam Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman secara Nasional melalui lomba Tik Tok Tahun 2021. Diberikan oleh Badan POM, dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM
- Peserta dengan Nilai Urutan Tertinggi ke 8 dalam Pelatihan Supervisory Development Programme (SDP) Tahun 2021 a.n Winda Pratiwi, S.Farm, Apt.
- Peserta Terbaik II dalam Pelatihan Teknis Penilaian Kosmetik dan DIP Tingkat Kesulitan I Tahun 2021 a.n Nur Maulida, S.Farm, Apt
- Peserta terbaik dalam Workshop Keprotokolan dan Kehumasan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Utama tgl 26 Februari 2021 a.n Clara Diana S, S.Farm., Apt.
- Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan Terbaik Periode Tahun 2023

- Balai Terbaik 2 Pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat Dan Makanan 2024
- Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang sebagai satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2023 dan 2024 berpredikat “Sangat Baik”
- Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang sebagai satuan kerja yang aktif menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) TA 2024 dengan jumlah transaksi “Tertinggi”

KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi

efektivitas dan efisiensi Balai POM di Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Tangerang, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Jumlah SDM belum memenuhi ABK

Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Tangerang sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dengan jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah pegawai di Balai POM Tangerang sampai dengan Oktober 2025 sebanyak 38 ASN dengan rincian 25 PNS Aktif, 1 PNS Tubel, 8 CPNS dan 4 PPPK.

Tabel 2. Data ABK

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Tangerang	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Tangerang	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	2	0	100%
5	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
6	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
7	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	1	2	33%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	5	2	3	40%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	14	7	7	50%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	17	17	0	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	Fungsional	0	1	-1	100%
12	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
13	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
15	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
17	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
18	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
19	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
20	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
21	Penata Kelola Obat dan Makanan	Pelaksana	0	1	-1	100%
Total			55	38	17	69,09%

Berdasarkan data ABK Balai POM di Tangerang diatas, saat ini jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan baru terpenuhi sebesar 69,09%. Keterbatasan jumlah pegawai ini menyebabkan beban kerja masing-masing pegawai tinggi dan kegiatan dijalankan secara multitasking.

2. Sarana dan prasarana yang belum optimal

Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang terdiri dari dua bangunan dan masing-masing bangunan terdiri dari tiga lantai dengan total luas bangunan kantor 298 m² dan total luas bangunan laboratorium 270 m². Untuk memenuhi kebutuhan setiap fungsi kantor dibagi kedalam beberapa ruangan, untuk bangunan kantor terdiri dari ruang resepsionis, ruang konsultasi, ruang penyimpanan atau gudang, ruang kepala, ruang fungsi pemeriksaan dan sertifikasi, ruang fungsi informasi dan komunikasi, ruang fungsi tata usaha, ruang penindakan, ruang pengujian, ruang rapat, mushola, dan tiga kamar mandi. Namun terdapat keterbatasan pada ruang ruangan tersebut, hal ini dapat menghambat kelancaran pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan, terutama dalam hal pengujian sampel dan pelayanan masyarakat.

3. Tanah dan bangunan kantor berstatus sewa

Balai POM di Tangerang beralamat di Ruko Griya Idola Industrial Park Blok AB No. 1 Bitung Jaya, Kabupaten Tangerang. Sedangkan Laboratoriumnya beralamat di Griya Idola Industrial Park Blok AB No. 2 Bitung Jaya, Kabupaten Tangerang. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan tersebut adalah sewa dari pihak ketiga. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan no 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana kondisi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional lembaga.

4. Laboratorium belum terakreditasi ISO 17025:2017

Pada tahun 2024 Balai POM di Tangerang mulai melakukan pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium Level I. Adapun pengujian yang dapat dilakukan pada laboratorium level I adalah pengujian sederhana dan Rapid Test Obat yakni pengujian sampel dengan reaksi warna, KLT dan Waktu Hancur untuk laboratorium kimia, dan pengujian ALT, AKK untuk laboratorium mikro di Balai POM Tangerang.

Adapun daftar alat labolatorium yang ada pada Balai POM di Tangerang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Alat Laboratorium di Balai POM di Tangerang

No	Nama Alat	Standard	Penilaian tahun 2024		
			Alat yang	Pemenuha	Verifikasi
1	KCKT (autosampler)	1	0	0	0
	- Detektor PDA	1	0	0	0
2	pH meter	1	0	0	0
3	Spektrofotometer UV- VIS	1	0	0	0
4	Timbangan analitik + Meja	1	1	100	100
5	Timbangan Mikro + Meja	1	0	0	0
6	Timbangan Top Loading+meja	1	0	0	0
7	Spektrodensitometer	1	0	0	0
8	Anak timbangan (1 set)	1	1	100	100
9	Chemical Storage **	1	1	100	100
10	Dehumidifier	1	1	100	100
11	Fume Hood*	1	1	100	100
12	Hotplate stirrer	1	1	100	100
13	Microsyringe for TLC	5	1	20	0
14	Termohigrometer *	1	2	200	100
15	UPS (kapasitas >10 KVA) *	1	0	0	0
16	purification tersentral	1	1	100	100
17	(Kabinet)	1	1	100	100
18	Mikropipet				0
	- 0,5-10 µL	1	1	100	100
	- 2-20 µL	1	1	100	100
	- 20-200 µL	1	1	100	100
	- 100-1000 µL	1	1	100	100
	- 1-5 mL	1	1	100	100
	- 0,5 - 10 mL	1	1	100	100
19	Chamber untuk KLT (20x20)	6	2	33,33	33,33
20	Hotplate /Setrika Portable	1	1	100	100
21	Termometer digital	1	1	100	100
22	Shaker waterbath	1	1	100	100
23	Automatic Desicator	1	1	100	100
24	Vortex Mixer	1	1	100	100
25	Sentrifuge (berpendingin)	1	0	0	0
26	Ultrasonik	1	0	0	0
28	Vacuum pump	1	1	100	100
29	Penyaring FG KCKT	1	0	0	0
30	Oven	1	1	100	100
31	Fat Analyzer + Hydrolysis apparatus	1	0	0	0
32	Automatic Distillation Unit	1	0	0	0
33	Muffle Furnace	1	0	0	0
34	Rotary Evaporator	1	0	0	0
35	Disintegration tester	1	0	0	0
36	Lemari Pendingin	1	1	100	100
37	Freezer	1	1	100	100
38	Pemanas Spiral	1	0	0	0
ALAT PENUNJANG					0
(jenis, ukuran atau jumlah sesuai kebutuhan)					
1	Alat gelas		1		
2	Syringe untuk KLT		0		
3	Penampak bercak / Sprayer KLT		1		
4	Blender Laboratorium		1		
5	Thermokopel		1		
6	Desikator vakum		0		
7	TC Color File (sebagai acuan pembanding warna)		1		
			48	59,38	56,59

PELUANG (OPPORTUNITY)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Tangerang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan :

1. Perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan

Balai POM di Tangerang memanfaatkan media *online* untuk melakukan penyebaran informasi / edukasi kepada masyarakat dalam bentuk infografis, poster, video dan sebagainya. Informasi tersebut disebarakan melalui instagram, subsite, *WhatsApp Blast* dan Youtube. Berikut akun-akun media sosial yang dikelola oleh Balai POM di Tangerang :

- Instagram : @bpom.tangerang
- X : @bpomtangerang
- Facebook : bpom.tangerang
- Youtube : Balai POM di Tangerang
- Tiktok : @bpom.tangerang

2. Meningkatnya permohonan sertifikasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan

Layanan kegiatan sertifikasi merupakan salah satu bentuk pengawasan produk sebelum beredar (pre-market), yaitu dengan melakukan pemeriksaan di sarana produksi dan distribusi dalam rangka persetujuan izin produksi/distribusi serta registrasi produk. Kegiatan sertifikasi dilakukan setelah ada permohonan pemeriksaan dari sarana produksi/distribusi kepada Kantor Balai POM di Tangerang, sebagai dasar kelengkapan izin produksi maupun registrasi produk obat, obat bahan alam, kosmetik, pangan, dan distribusi obat di Badan POM. Total jumlah rekomendasi Balai POM di Tangerang yang diterbitkan tahun 2024 adalah 462 rekomendasi dengan 454 rekomendasi diterbitkan tepat waktu. Jumlah rekomendasi industri pangan (MD) memiliki proporsi paling banyak, perhitungan rekomendasi MD ini berdasarkan jenis pangan yang diproduksi sedangkan pada komoditi lain berdasarkan sarana.

Tabel 4. Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Tangerang Tahun 2024.

Rekomendasi/Sertifikasi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	53	53
Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	9	9
Rekomendasi sertifikat CPKB	0	0
Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	71	71
Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	17	17
Rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	296	304
	0	0
	8	8
Total	454	462

Tabel 5. Permohonan Sertifikasi yang diterima tahun 2023.

Jenis Sarana	Permohonan	Rekomendasi
Industri Pangan (MD)	336	326
Industri Kosmetik (IKOS)	18	16
UKOT/UMOT/IOT	4	4
PBF	11	11
BUPN/Importir Kosmetik	37	35
Importir Suplemen Kesehatan	0	0
SMKPO	4	4
Jumlah	410	396

3. Adanya kebijakan percepatan layanan publik dan kemudahan berusaha

Kebijakan pemerintah terkait percepatan layanan publik dan kemudahan berusaha memberikan peluang strategis bagi Balai POM di Tangerang untuk meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan. Melalui program seperti reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan, dan Kolaborasi Satu Data, pemerintah mendorong unit layanan publik agar lebih responsif, efektif, transparan, dan ramah terhadap pelaku usaha. Kebijakan percepatan layanan ini membuka ruang bagi Balai POM di Tangerang untuk:

- mempercepat proses pelayanan pengawasan dan sertifikasi melalui pemanfaatan teknologi, meningkatkan kolaborasi dengan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan keamanan produk,
- memperluas jangkauan edukasi dan asistensi, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap kinerja pengawasan,
- menyederhanakan alur pelayanan sehingga lebih efisien dan mendukung iklim usaha yang sehat, aman, dan kompetitif.

Dengan adanya arah kebijakan nasional ini, Balai POM di Tangerang memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai institusi pengawasan yang modern, adaptif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui jaminan keamanan obat dan makanan di wilayah kerja.

Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Mengatur hak dan kewajiban penyelenggara layanan publik (termasuk instansi pemerintah) untuk memberikan layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Di dalamnya disebutkan standar pelayanan minimal (SPM) dan sistem pengaduan publik, sehingga instansi pemerintah, termasuk lembaga pengawas seperti BPOM, diharapkan bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan berkualitas.

4. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat

Kesadaran masyarakat meningkat merupakan pengaruh baik dari meningkatnya nilai indikator kinerja “Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan” dari tahun 2021 ke tahun 2024. Pada tahun 2021, realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 91,55. Memasuki tahun selanjutnya, realisasi indikator “Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan” meningkat menjadi 93,87 pada tahun 2022, 94,36 pada tahun 2023, dan 96,52 pada tahun 2024.

5. Lokasi kantor Balai POM di Tangerang dekat dengan pusat pemerintahan Kab. Tangerang dan kawasan industri

Kantor Balai POM di Tangerang beralamat pada Ruko Griya Idola Industrial Park blok AB no. 1, Kabupaten Tangerang. Adapun pusat pemerintahan Kab. Tangerang berada Jalan Pemda Tigaraksa yang berjarak 7,4 KM dari kantor Balai POM di Tangerang. Hal ini mempermudah Balai POM di Tangerang untuk berkoordinasi secara langsung terkait pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

ANCAMAN (*THREAT*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Tangerang dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal melalui media online dan offline meningkat

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, baik melalui jalur distribusi offline (toko fisik, gudang, kios, dan jaringan distribusi tradisional) maupun online (e-commerce, marketplace, media sosial, serta aplikasi pesan instan). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius mengingat produk ilegal tidak melalui proses penilaian keamanan, mutu, dan khasiat sebagaimana dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini menghadirkan tantangan besar bagi sistem pengawasan terutama di wilayah kerja Balai POM di Tangerang. Dimana peningkatan ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Konsumen yang tidak mengetahui risiko dapat menggunakan produk yang mengandung bahan berbahaya, Bahan Kimia Obat (BKO), atau bahan tambahan pangan terlarang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kerusakan organ, bahkan kematian. Dari sisi ekonomi, peredaran produk ilegal merugikan pelaku usaha legal yang telah memenuhi persyaratan produksi dan izin edar. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri maupun terhadap pengawasan pemerintah dapat menurun.

2. Hoaks terkait sediaan farmasi dan pangan olahan marak terjadi

Perkembangan teknologi digital, terutama media sosial dan aplikasi pesan instan, membuat informasi dapat tersebar sangat cepat tanpa proses verifikasi. Salah satu fenomena yang makin mengkhawatirkan adalah penyebaran hoaks terkait sediaan farmasi dan pangan olahan. Hoaks yang beredar biasanya memuat klaim menyesatkan, seperti peringatan palsu tentang bahaya suatu obat, isu adanya bahan kimia berbahaya dalam produk makanan tertentu, hingga tuduhan bahwa suatu produk menyebabkan penyakit tertentu tanpa bukti ilmiah. Informasi semacam ini seringkali tidak bersumber dari lembaga resmi dan tidak dilengkapi data pendukung.

3. Wilayah kerja pengawasan yang luas

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Tangerang ditetapkan menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang. Sesuai peraturan tersebut, diiringi dengan perubahan *catchment* area pengawasan yang semula satu wilayah Kabupaten Tangerang menjadi tiga wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2024, ketiga wilayah tersebut memiliki luas sekitar $\pm 1.370,964 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk sebanyak $\pm 6,8$ juta jiwa. Di area ini terdapat banyak jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi. Jumlah sasaran pengawasan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang pada akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Sasaran Pengawasan berdasarkan jenis sarana

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana		
		Kab. Tangerang	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan
1	Industri Farmasi	10	9	2
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit transfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	1	2	2
3	Industri OT (IOT)	17	8	2
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	1	0	1
5	Usaha kecil OT (UKOT)	13	6	5
6	Usaha Mikro OT (UMOT)	3	2	3
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	7	8	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0
10	Industri Kosmetik	65	27	10
11	Industri Farmasi yang memproduksi kosmetik	0	0	0
12	Industri pangan MD	420	235	129
13	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1587	1266	1298
14	PBF	38	64	41
15	Apotek	482	325	382
16	Toko Obat Berizin	86	34	39
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	1	1	1

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana		
		Kab. Tangerang	Kota Tangerang	Kota Tangerang Selatan
18	Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta)	28	31	35
19	Puskesmas	44	37	34
20	Balai Pengobatan/Klinik	503	101	195
21	Lain-lain (prakter dokter dan bidan)	0	0	0
22	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	1	0
23	Distribusi Obat Tradisional	565	275	232
24	Distribusi Suplemen Kesehatan	477	283	270
25	Distribusi Kosmetik	264	354	229
26	Klinik Kecantikan	102	80	73
27	Sarana peredaran pangan olahan	887	560	454
28	Sekolah serta jumlah murid SD menurut Kabupaten/Kota	685,9	338,3	303,090

4. Sanksi administratif tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan

Dalam penyelenggaraan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, pemberian sanksi administratif merupakan instrumen penting untuk menegakkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan. Sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, hingga pencabutan izin edar, secara normatif dirancang untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang telah ditetapkan.

Tabel 7. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths 1. Koordinasi dengan lintas sektor berjalan dengan baik 2. Edukasi masyarakat dan pendampingan pelaku usaha 3. Saluran komunikasi publik yang dikelola dengan baik 4. BMN dikelola dengan baik 5. Memiliki Inovasi dan Penghargaan	Weakness 1. Jumlah SDM belum memenuhi ABK 2. Sarana prasarana yang belum optimal 3. Tanah dan bangunan kantor berstatus sewa 4. Laboratorium belum terakreditasi ISO 17025:2017
Opportunities 1. Perkembangan teknologi yang	Threats 1. Peredaran sediaan farmasi dan pangan

memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan 2. Meningkatnya permohonan sertifikasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan 3. Adanya kebijakan percepatan layanan publik dan kemudahan berusaha 4. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat 5. Lokasi kantor Balai POM di Tangerang dekat dengan pusat pemerintahan Kab. Tangerang dan kawasan industri	olahan ilegal melalui media <i>online</i> dan <i>offline</i> meningkat 2. Hoaks terkait sediaan farmasi dan pangan olahan marak terjadi 3. Wilayah kerja pengawasan yang luas 4. Sanksi administratif tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
---	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 VISI

Balai POM di Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

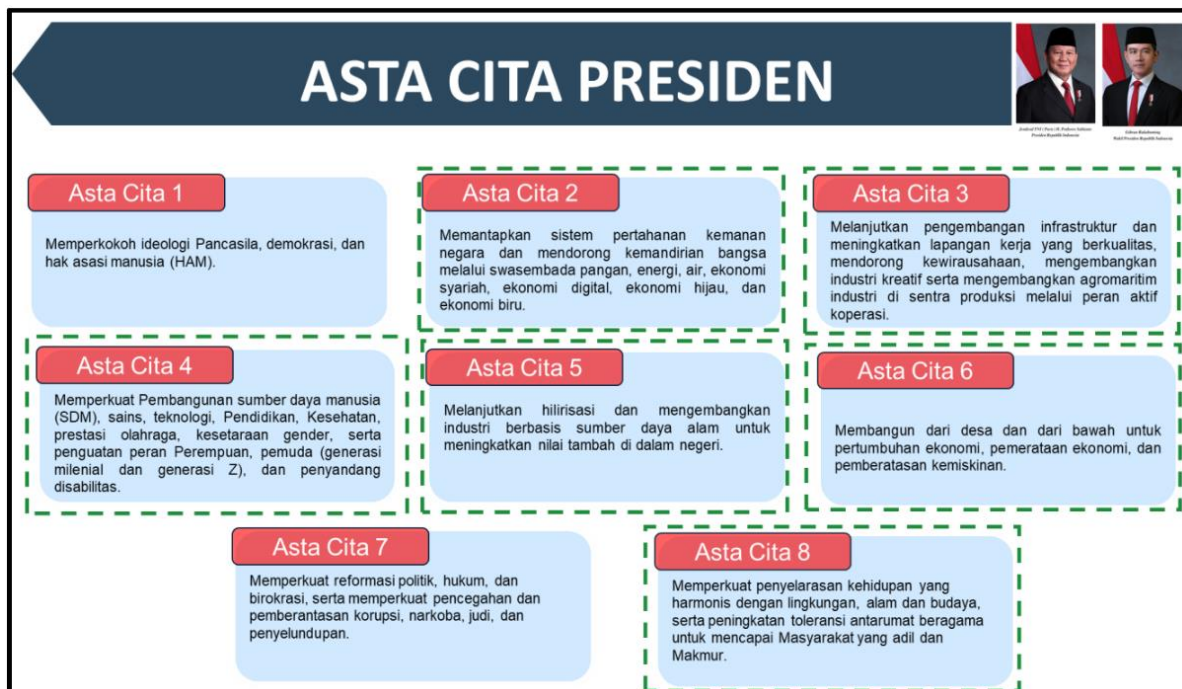
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 10. Asta Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 10. di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang

akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi Badan Pengawas Obat dan Makanan..

2.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 8. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai POM di Tangerang sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tangerang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk

yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan

untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 9. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Tangerang 2025-2029

Visi :

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	<i>dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	<i>yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
pemangku kepentingan	<i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Tangerang 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Tangerang :

Tabel 10. Matriks Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Tangerang

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan	Target pemeriksaan terkendala karena memerlukan pendampingan Pusat/BBPOM di	Melakukan koordinasi dengan unit pengampu dalam manajemen inspeksi CPOB termasuk untuk mendorong	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Serang yang disebabkan belum terkualifikasinya personil Balai POM di Tangerang sebagai inspektur kepala	kualifikasi personil Balai POM di Tangerang sebagai inspektur kepala	
		<i>Timeline</i> sampling dan pengujian tidak terpenuhi	Pembagian personil sampling untuk tiap komoditi Mengikuti pelatihan mandiri melalui ideas terkait sampling dan pengujian	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Tidak tercapai target pemeriksaan sarana fortifikasi	Perencanaan dan monev capaian sarana fortifikasi dengan cermat dan <i>review</i> target karena indikator baru	Fungsi Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Minimnya partisipasi masyarakat dalam program KIE baru yaitu Jemput Bola (DIVA, Gemilang Drive Thru)	Melakukan konfirmasi program KIE ke kecamatan lokasi KIE berada, dan penyebaran informasi melalui media sosial (<i>whatsapp</i> , dan <i>instagram</i>)	Fungsi Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Sarana yang menjadi target pendampingan UMKM tidak melanjutkan sampai tahap akhir	Penerbitan Surat Komitmen UMKM untuk mengikuti pendampingan oleh Balai POM di Tangerang	Fungsi Pemeriksaan
			Melakukan monitoring secara berkala	
			Penguatan koordinasi melalui pembentukan grup <i>whatsapp</i> UMKM terkait <i>Desk</i> Pengajuan Izin	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Maraknya peredaran Obat dan Makanan ilegal di wilayah pengawasan Balai POM di Tangerang	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan dan POLRI)	Fungsi Penindakan
			Melakukan kegiatan intelijen untuk	

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
	wilayah kerja UPT		memperoleh informasi terkait peredaran Obat dan Makanan ilegal	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Tidak terlaksananya kegiatan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Melakukan penyesuaian target sesuai dengan ketersediaan anggaran Berkoordinasi dengan unit pengampu secara intensif dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target kegiatan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Banyaknya Sarana Produksi pangan MD* khususnya UMK tidak sesuai dengan ketentuan	Melakukan bimbingan Teknis CPPOB untuk UMK Pemberian buku panduan CPPOB kepada UMK	Fungsi Pemeriksaan
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Belum memiliki lahan yang mencukupi untuk kantor Balai POM di Tangerang	Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Mencari lahan yang sesuai dengan kebutuhan kantor	Fungsi Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post* market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk

- regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
 6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
 7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI POM DI TANGERANG

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan, Balai POM di Tangerang berperan mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

- 1) Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
- 2) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
- 4) Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- 5) Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- 6) Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- 7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Strategi Balai POM di Tangerang disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis (SWOT) yang menggambarkan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah kerja Balai POM di Tangerang. Adapun strategi yang ditetapkan Balai POM di Tangerang untuk dapat melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
- 6) Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
- 7) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

PEMETAAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

No	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan	Peningkatan pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan secara menyeluruh berbasis risiko, mencakup penyempurnaan regulasi, peningkatan farmakovigilans, program Makan Bergizi Gratis serta perluasan cakupan pengawasan produk dan fasilitas, termasuk yang belum memiliki izin.

No	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Bergizi Gratis	
2	Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk melalui peningkatan kompetensi pegawai serta sinergi dengan lintas sektor.
3	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan pembinaan dan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha, termasuk pendampingan UMKM, guna memperkuat daya saing di wilayah kerja Balai POM di Tangerang
4	Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi yang inovatif di wilayah kerja Balai POM di Tangerang untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui media <i>offline</i> dan <i>online</i>
5	Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Melibatkan lintas sektor pada kegiatan intensifikasi pengawasan obat dan makanan (Inspeksi, KIE, dan Penindakan) termasuk koordinasi terkait upaya pemenuhan prasarana untuk penguatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang
6	Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Optimalisasi pengelolaan SDM, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kualitas laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan untuk penguatan kelembagaan Balai POM di Tangerang

No	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
7	Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penguatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Tangerang dan meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dengan digitalisasi kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Tangerang

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Tangerang juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, Balai POM di Tangerang melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tangerang mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

Kegiatan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia terdiri dari 20 (dua puluh) rincian *output* sebagai berikut :

1. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT

Program pemerintah dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berdaya saing maka BPOM harus lebih sensitif dan selektif dalam memilah mana pelaku usaha yang belum memahami ketentuan sehingga perlu dilakukan pembinaan dan mana pelaku usaha yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk melakukan perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Agar sebelumnya dilakukan assessment dengan baik dan

mengedepankan upaya pencegahan melalui peningkatan kegiatan cegah tangkal, intelijen, dan siber sehingga tindak lanjut yang diambil tepat sasaran, mampu menimbulkan efek jera, dan memiliki dampak yang luas.

2. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT

Masih maraknya peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, disamping itu dampak dari globalisasi perdagangan bebas mengakibatkan produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat banyak beredar dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya. Di pihak lain, kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produk obat dan makanan dan mengedarkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan.

3. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

Balai POM di Tangerang melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan, mutu, dan manfaat produk yang dikonsumsi. Secara internal kegiatan ini menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Penyebaran Informasi dan pengawasan produk Obat dan Makanan.

4. Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan

Terselenggaranya pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang sehingga masyarakat terlindungi dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif maka obat dan makanan yang beredar dimasyarakat dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutunya. Dengan terselenggaranya pengawasan yang efektif di setiap Balai POM maka obat dan makanan yang diproduksi dan beredar di Indonesia mempunyai jaminan keamanan, manfaat dan mutu yang baik. Kegiatan ini terkait dengan Kedeputian I, II, III dan memberikan berkontribusi terhadap keberhasilan dari pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif perusahaan yang bergerak dibidang Obat dan Makanan mempunyai daya saing yang unggul, serta dapat terlindungi dari pemalsuan produk. Diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai yang memungkinkan dilaksanakan pengawasan obat dan makanan yang efektif.

5. Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT

Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman dan tepat secara cerdas, termasuk bagaimana menyaring dan menelaah informasi Obat dari penandaan dan iklan

yang mereka jumpai sehari-hari. Secara internal kegiatan ini menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk Obat dan Makanan.

6. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Kegiatan strategis yang dilakukan Balai POM di Tangerang yaitu pengadaan untuk sarana gedung yang memadai seperti naik daya listrik, pemasangan *sun blast*, pengadaan *air conditioner*, meja dan kursi kerja pegawai, televisi, CCTV, *sound system*, partisi untuk laboratorium dan alat *zero grounding*.

7. Perangkat pengolah data dan komunikasi

Kegiatan strategis yang dilakukan Balai POM di Tangerang yaitu pengadaan untuk menunjang para pegawai melakukan pekerjaannya dengan baik yaitu pengadaan tablet, *personal computer*, laptop, *scanner*, *printer*, dan *external hard disk*.

8. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*

Terselenggaranya pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tangerang sehingga masyarakat terlindungi dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dalam pelaksanaannya pengujian membutuhkan sarana dan prasarana penunjang, peningkatan kompetensi SDM, kalibrasi dan pemeliharaan peralatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium, sehingga terwujud pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terjamin keamanan, manfaat dan mutunya.

9. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan

Perlindungan kepada masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat, sehingga pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan pengawasan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara internal kegiatan ini menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait termasuk *Criminal Justice System (CJS)* dalam rangka pengawasan produk Obat dan Makanan. Untuk meningkatkan upaya pemberantasan peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan perlu dilakukan kegiatan yang meliputi: investigasi awal, operasi gabungan daerah, operasi gabungan nasional dan penyidikan dalam rangka *Pro Justicia* dan sanksi administrative.

10. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Balai POM di Tangerang melaksanakan program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman untuk menciptakan komunitas sekolah yang mandiri dan *aware* tentang konsumsi pangan sehat dan aman. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimtek keamanan pangan, pemberian paket edukasi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS), monitoring dan evaluasi pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah termasuk sampling PJAS, dan sertifikasi sekolah.

11. Desa Pangan Aman

Sebagai upaya meningkatkan kemampuan komunitas desa dalam memahami dan menerapkan praktek keamanan pangan di kehidupan sehari-hari. Secara internal kegiatan ini menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk Obat dan Makanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui advokasi kelembagaan desa, pelatihan kader keamanan desa (KKPD), bimbingan teknis komunitas, pengawasan keamanan pangan, fasilitasi keamanan pangan, serta monitoring dan evaluasi program keamanan pangan desa.

12. Pasar aman dari bahan berbahaya

Secara internal kegiatan ini menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk Obat dan Makanan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit, meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

13. Sarana pelayanan kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans

Untuk mewujudkan Kemandirian Masyarakat dalam melindungi diri dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman dan bermutu dalam hal menaikan pemahaman, pengetahuan dan *awareness* tenaga kesehatan/tenaga medis dalam pelaporan KTD/ESO. Secara internal kegiatan ini menunjang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Penyebaran Informasi dan pengawasan produk Obat dan Makanan.

14. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

Masih maraknya peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, disamping itu dampak dari globalisasi perdagangan bebas mengakibatkan produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat banyak beredar dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya. Di pihak lain, kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produk obat dan makanan dan mengedarkan produk obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat masih perlu ditingkatkan. Serta pemahaman pelaku UMKM dalam cara produksi yang baik dalam penjaminan keamanan dan mutu produk masih rendah, sehingga diperlukan pendampingan secara konsisten.

Dukungan penuh Badan POM terhadap UMKM antara lain diwujudkan dengan memberikan insentif kemudahan melalui berbagai upaya percepatan, penyederhanaan, dan pendampingan intensif kepada UMKM melalui bimbingan teknis dan desk yang bersifat proaktif dalam rangka Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik, registrasi produk agar dapat memenuhi persyaratan sehingga dapat mendukung percepatan dalam mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE), dan keringanan tarif 50 persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi pendaftaran produk Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan olahan, Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Kosmetik Golongan B dan Golongan A.

15. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT

Untuk memastikan bahwa produk pangan dan pangan fortifikasi yang beredar adalah produk yang memenuhi persyaratan, maka Balai POM di Tangerang melakukan pengujian sesuai dengan standar meliputi Parameter Fisika, Kimia dan Mikrobiologi secara Kualitatif dan Kuantitatif. Kegiatan ini meliputi pengadaan belanja bahan dan belanja persediaan barang konsumsi (Reagen dan Media Mikrobiologi) yang diperlukan untuk pengujian sejumlah sampel termasuk sampel regionalisasi di Region Semarang.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, sebagai implementasi dari pengawasan Post Market tersebut, maka Balai POM di Tangerang melakukan pengambilan sampel pangan dan pangan fortifikasi di sarana produksi dan sarana distribusi di seluruh wilayah kerja Balai POM di Tangerang yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

16. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT

Kegiatan pengawasan *pre* dan *post market* merupakan salah satu dari kegiatan pokok Badan POM RI dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, maka Balai POM di Tangerang secara rutin melakukan pengambilan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan obat kuasi di sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kesehatan. Kegiatan sampling di seluruh wilayah kerja Balai POM di Tangerang yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

17. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT

Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai POM di Tangerang dilakukan melalui kegiatan pengawasan *pre* dan *post market* yang merupakan salah satu dari kegiatan pokok Badan POM RI dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Pengawasan *pre market* dilakukan atas dasar permintaan dari pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk obat dan makanan yang akan diedarkan di Indonesia, sedangkan pengawasan *post market* dilakukan untuk menunjukkan konsistensi dari penerapan peraturan-peraturan yang ada di bidang obat dan makanan, sarana yang diperiksa meliputi : Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetik, Industri Kecil Obat Tradisional, Industri Suplemen Kesehatan, Industri Pangan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka Tindak Lanjut/ Monitoring Hasil Pengawasan (Saksi Pemusnahan/Pendampingan/Tindak Lanjut Kasus) Merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana Produksi yang dilakukan diluar target perencanaan rutin berupa kegiatan pemeriksaan dalam rangka melakukan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan/aduan, Monitoring Hasil Pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi saksi pemusnahan obat dan makanan yang dilakukan oleh sarana produksi, dan Pemeriksaaan dalam rangka pendampingan petugas dari Pusat.

18. Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa

Indonesia saat ini sedang berusaha untuk melakukan percepatan untuk penurunan *Stunting*, Menurut WHO, 2015, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar, salah satu dari penyebab stunting adalah kurangnya asupan mikronutrien yang ditumbuhkan

dalam perkembangan anak, untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Perpres No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dimana salah satu upaya untuk memenuhi mikronutrien yang dibutuhkan ini adalah dengan melakukan Fortifikasi Pangan, yaitu pemberian zat gizi (fortifikan) pada produk pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Saat ini ada 3 produk pangan yang diberikan fortifikan yaitu Garam, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit, dalam mendukung pelaksanaan program fortifikasi nasional Badan POM melakukan upaya-upaya untuk memastikan produk pangan yang difortifikasi terjamin keamanan dan mutunya serta kesesuaian jumlah/kadar fortifikan yang ditambahkan, salah satunya adalah melalui program pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.

19. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT

Peredaran produk Obat dan Makanan semakin meningkat baik jenis maupun jumlahnya demikian pula dengan ditemukannya produk yang tidak memenuhi ketentuan atau ilegal baik produk lokal maupun import. Demikian juga dengan diberlakukannya kebijakan di bidang perdagangan bebas di wilayah ASEAN khususnya seperti AFTA, ACFTA dan lain-lain mengakibatkan membanjirnya produk impor di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan tugas Badan POM semakin berat dan kompleks, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan produk yang beredar, oleh karenanya diperlukan peningkatan kompetensi petugas pengawas agar senantiasa memperoleh informasi terbaru dan semakin kompeten, Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan post market di sarana distribusi Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Makanan dan Pangan, yang bertujuan untuk melindungi produk Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Makanan dan Pangan dari penanganan distribusi yang salah serta sebagai salah satu bentuk perlindungan masyarakat.

20. Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*

Kegiatan ini mencakup pengadaan alat-alat laboratorium yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap sampel-sampel Balai POM di Tangerang. Alat-alat laboratorium tersebut seperti meja laboratorium, kursi laboratorium, *emergency shower*, *blender*, *thermohygrometer*, *thermocouple*, lemari sampel, lemari perlengkapan, *trolley*, *TC color file*, *UPS* dan APAR.

2) Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Balai POM di Tangerang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan sediaan farmasi dan makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Tangerang. Kegiatan tersebut terakomodir dalam rincian *output* Layanan Perkantoran.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM 2025-2029, Balai POM di Tangerang menetapkan sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Balai POM di Tangerang. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator dan target kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK. 1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1.1.	Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25	84,50	85,75	87,00	88,25
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,33	84,00	85,67	87,00	88,67

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,25	86,50	87,75	89,00	90,25
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	87,00	89,00	92,00	95,00
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,08	91,48	92,88	94,28	95,68
1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14,00	18,00	21,00	24,00	26,00
1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	66,67	100,00	100,00	100,00
1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)		81,00	82,00	83,00	84,00
SK. 2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					
2.1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	69,00	73,00	77,00	81,00	85,00
SK. 3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,86	87,73	88,60	89,46	90,33
3.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00

Sasaran Kegiatan / Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
3.3	Jumlah desa pangan aman	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SK. 4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18,42	36,84	56,58	77,63	100,00
SK. 5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	78,00	78,00	80,00	80,00	80,00
SK. 6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar oleh UPT	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
SK. 7.	Layanan Publik UPT yang Prima					
7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
SK. 8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal					
8.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
8.2	Nilai AKIP UPT BPOM	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00
8.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,94	3,00	3,00	3,10	3,10

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Tangerang periode 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Kerangka pendanaan Balai POM di Tangerang tahun 2025-2029 berdasarkan kegiatan.

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4.393,5	4.613,1	4.843,8	5.086,0	5.340,3
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6.859,4	7.202,3	7.562,4	7.940,6	8.337,6
TOTAL	11.260,9	11.815,4	12.406,2	13.026,6	13.677,9

Tabel 12.1 Kerangka pendanaan Balai POM di Tangerang tahun 2025-2029 berdasarkan sumber dana.

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	11.260,8	11.815,5	12.406,3	13.026,6	13.677,9
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	5,000	10,000
TOTAL	11.260,8	11.815,5	12.406,3	13.031,6	13.687,9

Pada tahun 2024, 2025, dan 2026, Balai POM di Tangerang masih sepenuhnya mengandalkan sumber pembiayaan dari rupiah murni dalam mendukung seluruh program, kegiatan, serta operasional pengawasan, mengingat mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum dapat diimplementasikan pada periode tersebut; sementara itu, pemanfaatan PNBP direncanakan mulai dapat dioptimalkan pada tahun 2027 sebagai salah satu sumber pembiayaan tambahan untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tangerang.

BAB V

PENUTUP

Renstra Balai POM di Tangerang 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Balai POM di Tangerang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Diharapkan semua fungsi yang ada di Balai POM di Tangerang dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Renstra Balai POM di Tangerang mempedomani Keputusan Kepala Badan POM No. 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Pelaksanaan Renstra Balai POM di Tangerang ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis BPOM tahun 2025-2029 dan Visi Misi Presiden. Kegiatan dalam Renstra Balai POM di Tangerang 2025-2029 ini telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2025-2029 sebagai *impact assessment*.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Balai POM di Tangerang Tahun 2025-2029 dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi BPOM.

LAMPIRAN I

Tabel 13. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Tangerang tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								6.859,4	7.202,3	7.562,4	7.940,6	8.337,6		
SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan										Balai POM di Tangerang	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		83.25	84.50	85.75	87.00	88.25						
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26.00	27.00	28.00	29.00	30.00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75.00	77.00	79.00	81.00	83.00						
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.00	88.00	89.00	90.00	91.00						
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		70.00	71.00	72.00	73.00	74.00						
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82.33	84.00	85.67	87.00	88.67						
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa		76.00	78.00	80.00	82.00	84.00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan												
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.25	86.50	87.75	89.00	90.25						
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.00	87.00	89.00	92.00	95.00						
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		90.08	91.48	92.88	94.28	95.68						
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80.00	81.00	82.00	83.00	84.00						
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		14.00	18.00	21.00	24.00	26.00						
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		33.33	66.67	100.00	100.00	100.00						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81.00	82.00	83.00	84.00						
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			90,00	90,00	95,00	100,00	105,00						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			284,00	287,00	300,00	315,00	332,00						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			118,00	141,00	160,00	172,00	189,00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6	
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		187,00	229,00	248,00	267,00	286,00						
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		144,00	144,00	144,00	144,00	144,00						
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	519	519	519	519						

[illegible]

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		86.86	87.73	88.60	89.46	90.33						
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2.00	3.00	4.00	5.00	6.00						
	3	Jumlah desa pangan aman		1.00	2.00	3.00	3.00	3.00						
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			162,00	300	320,00	340,00	360,00						
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			22,00	9,00	10,00	12,00	14,00						
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
	RO 4: Desa Pangan Aman			1,00	2,00	3,00	3,00	3,00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0						Balai POM di Tangerang
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		18.42	36.84	56.58	77.63	100.00						
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			14,00	14,00	15,00	16,00	17,00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan										Balai POM di Tangerang	
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		78.00	78.00	80.00	80.00	80.00						
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			2,00	2,00	2,00	3,00	3,00						
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0					Balai POM di Tangerang	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14,00	14,00	15,00	15,00	15,00						
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima		Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0						Balai POM di Tangerang
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4.2	4.3	4.4	4.5	4.6						
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			228,00	359,00	374,00	410,00	451,00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tangerang								11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6		
SK 9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0						Balai POM di Tangerang
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		75.00	76.00	77.00	78.00	79.00						
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		76.00	76.50	77.00	77.50	78.00						
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2.94	3.00	3.00	3.10	3.10						
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Balai POM di Tangerang							11,260,8	11,823,9	12,415,0	13,035,8	13,687,6	
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		6,00	0	6,00	6,00	6,00						
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM							4.393,5	4.613,1	4.843,8	5.086,0	5.340,3	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						